

PEMERINTAH
PROVINSI RIAU



LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

Jalan Pattimura No. 6 Telp (0761) 22921 Fax. (0761) 23191

PEKANBARU - 28131

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2024.

Sebagai provinsi yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, Riau terus berkomitmen untuk mengembangkan sektor ini secara berkelanjutan. Sepanjang tahun 2024, berbagai program strategis telah kami laksanakan, meliputi:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor perikanan budidaya
2. Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan
3. Penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan
5. Konservasi ekosistem laut dan pesisir

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan data capaian kinerja, produksi perikanan pada tahun 2024 tercatat sebesar 245.661,64 ton. Angka ini mengalami sedikit penurunan sebesar 06,04% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 260.506,98 ton. Meskipun terjadi penurunan, capaian produksi ini tetap menunjukkan kontribusi yang signifikan bagi sektor perikanan dan ketahanan pangan daerah.

Berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2024 telah menjadi katalisator bagi kami untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun strategi perbaikan yang lebih komprehensif. Kami optimis bahwa dengan penyempurnaan program dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, kinerja sektor kelautan dan perikanan akan dapat ditingkatkan secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan pada tahun-tahun berikutnya.

Pekanbaru, 10 Januari 2025



**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI RIAU**

H. YURNALIS, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19710417 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Keragaan Organisasi Perangkat Daerah.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB II KONDISI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU	14
2.1 Keadaan Umum	14
2.2 Keragaan Data Perikanan dan Kelautan	26
BAB III PROGRAM KERJA DAN CAPAIAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	52
3.1 Indikator Kinerja Utama Target IKU dan Program.....	52
3.2 APBD	63
3.3 APBN	114
3.4 Pendapatan Asli Daerah.....	118
BAB IV PENUTUP	119

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I, Dokumentasi Kegiatan Bidang Perikanan Budidaya dan UPT Budidaya	33
Lampiran II, Dokumentasi Kegiatan Bidang Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan.....	39
Lampiran III, Dokumentasi Kegiatan Bidang Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tangkap (P2HKP) dan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP).....	43
Lampiran IV, Dokumentasi Kegiatan Bidang Kelautan dan Pengawasan (KP), UPT. Wil. I, Wil. II, Wil. III, Wil. IV	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Riau memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi ini memberikan kewenangan otonomi kepada Provinsi Riau untuk mengembangkan potensi daerahnya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki, termasuk sumberdaya kelautan dan perikanan, demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berpedoman pada dua arah kebijakan utama:

1. Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya dalam rangka mendukung ketahanan pangan.
2. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pesisir, pulau-pulau kecil dan pemberantasan *IUU Fishing*.

Sebagai unit kerja pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan asas akuntabilitas. Hal ini berarti setiap penyelenggaraan program dan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat, termasuk penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini diwujudkan melalui pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Instrumen akuntabilitas ini dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya. Sementara itu, untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, upaya dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.

1.2. Keragaan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah ditetapkan secara resmi. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur tentang susunan organisasi serta Tata Kerja yang berlaku di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terdiri dari :

- 1. **Sekretariat**, terdiri dari :
 - a. Subbagian Kepegawaian dan Umum dan
 - b. Subbagian Keuangan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
- 2. **Bidang Perikanan Budidaya**, terdiri atas :
 - a. Kelompok JF Substansi, Produksi dan Usaha Budidaya
 - b. Kelompok JF Substansi, Pengembangan Kawasan Budidaya
 - c. Kelompok JF Substansi, Pakan dan Kesehatan Ikan, dan
- 3. **Bidang Perikanan Tangkap**, terdiri atas :
 - a. Kelompok JF Substansi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan
 - b. Kelompok JF Substansi Kenelayanan
 - c. Kelompok JF Substansi Pengendalian Penangkapan Ikan, dan
- 4. **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan**, terdiri atas;
 - a. Kelompok JF Substansi Pelayanan Usaha Dan Kelembagaan
 - b. Kelompok JF Substansi Pemasaran Hasil dan Promosi
 - c. Kelompok JF Substansi Pembinaan Mutu Produk, dan

5. **Bidang Kelautan dan pengawasan**, terdiri atas :

- a. Kelompok JF Substansi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- b. Kelompok JF Substansi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem
- c. Kelompok JF Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan

6. **Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)**, terdiri atas :

- a. UPT. Budidaya Perikanan
- b. UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)
- c. UPT. Pelabuhan Perikanan
- d. UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan WIL I
- e. UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan WIL II
- f. UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan WIL III

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau merupakan instansi pemerintah daerah yang berperan penting dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Riau. Dalam struktur organisasinya, kepemimpinan dinas ini diatur secara berjenjang dengan pembagian sebagai berikut:

Kepala Dinas sebagai pucuk pimpinan memegang jabatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a). Di bawah kepemimpinannya, terdapat Sekretaris yang menduduki posisi sebagai Pejabat Administrator (eselon III.a). Struktur ini dilengkapi dengan beberapa Kepala Bidang yang juga menyandang jabatan sebagai Pejabat Administrator (eselon III.a), serta Kepala Subbagian yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengawas (eselon IV.a)

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP), serta Bidang Kelautan dan Pengawasan;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP), serta Bidang Kelautan dan Pengawasan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP), serta Bidang Kelautan dan Pengawasan;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP), serta Bidang Kelautan dan Pengawasan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Sekretariat**

Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- f. Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional
- **Subbagian Kepegawaian dan Umum** mempunyai tugas:
 - a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
 - f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
 - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
 - k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

- **Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik**

Daerah menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;
- e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya.
- f. penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;
- i. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- l. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan,
- m. Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas.

- **Bidang Perikanan Budidaya**

Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait produksi dan usaha budidaya, pengembangan kawasan budidaya, pakan dan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perikanan Budidaya;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang perikanan budidaya;
 - c. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait;
 - d. pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya antara lain meliputi penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan produksi dan usaha budidaya, pengembangan kawasan budidaya, pakan dan kesehatan ikan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Bidang Perikanan Tangkap**

Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan, kenelayanan, dan pengendalian penangkapan ikan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang perikanan tangkap;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang perikanan tangkap;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait.
- d. pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap.
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Perikanan Tangkap; dan

- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan**

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, terkait pemasaran dan promosi, usaha dan kelembagaan, dan pembinaan mutu produk. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait;
- d. pelaksanaan kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- g. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

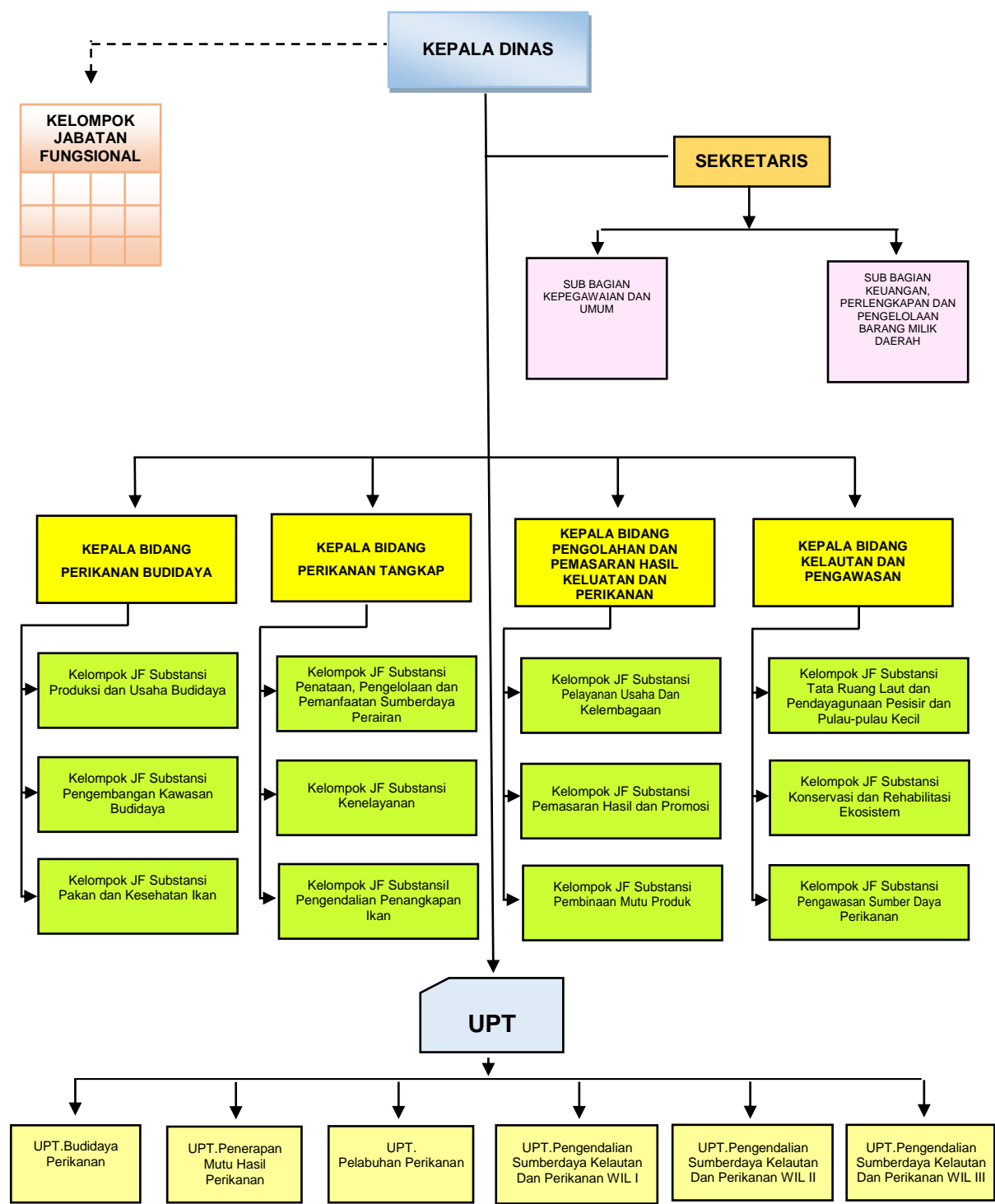
- **Bidang Kelautan dan Pengawasan**

Bidang Kelautan dan Pengawasan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, terkait tata ruang laut dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Bidang Kelautan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

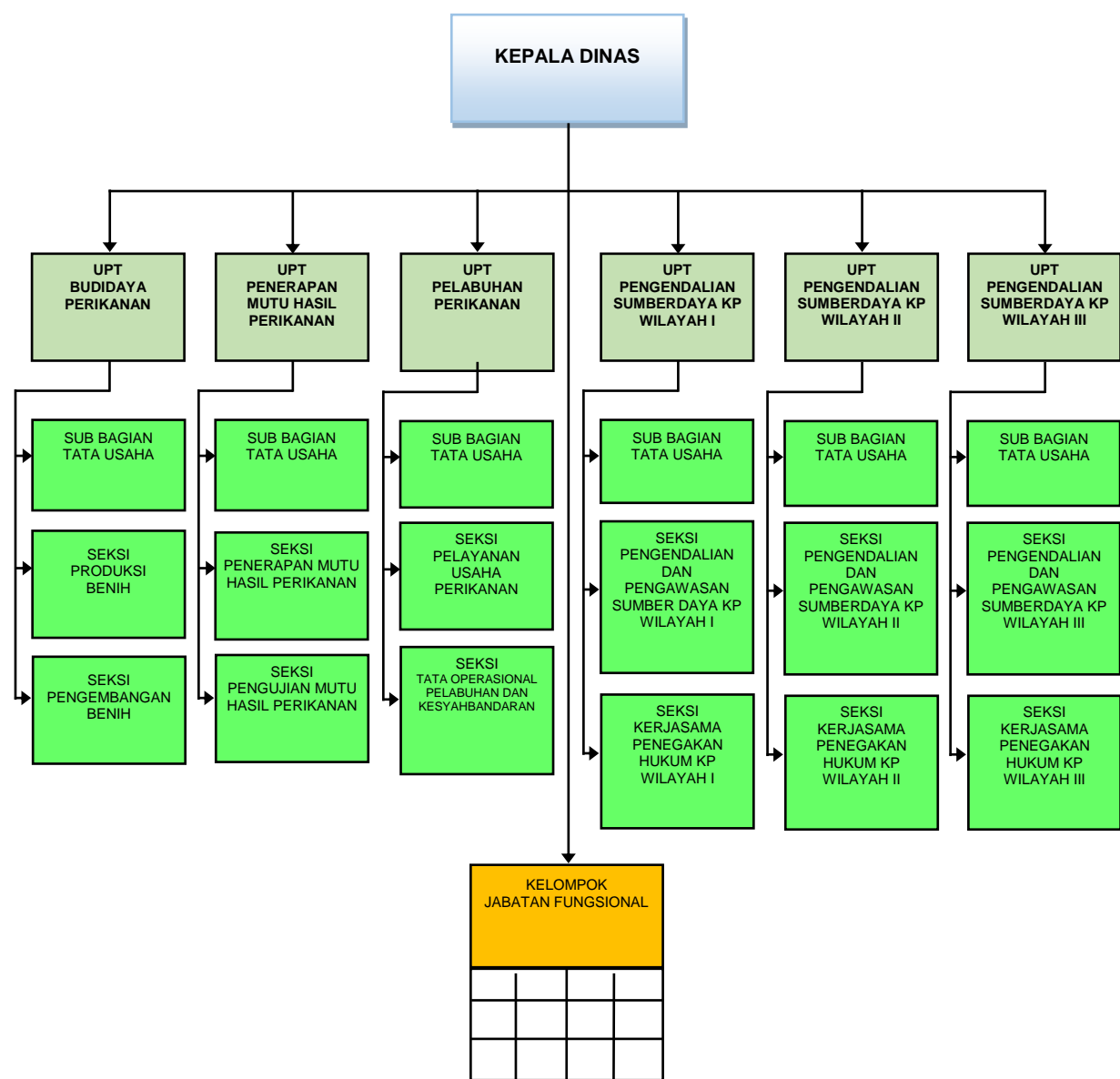
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kelautan dan Pengawasan;

- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Kelautan dan Pengawasan;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang Kelautan dan Pengawasan dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Pengawasan antara lain meliputi penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan tata ruang laut dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi, pengawasan sumber daya perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kelautan dan Pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- g. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
yaitu:



Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah teknis tertentu seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat; perbenihan; laboratorium; dan pelabuhan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.



1.3.1 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pencapaian kinerja suatu organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan ditentukan oleh tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga. SDM sebagai salah satu perangkat kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terdiri dari sejumlah personil /pegawai berdasarkan kualifikasi dengan komposisi seperti diuraikan pada tabel 1.1

Tabel 1.
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

JUMLAH ASN	PENDIDIKAN TERAKHIR						TOTAL
	S3	S2	S1	D4	D3	SMA	
Jumlah ASN Laki-Laki	-	19	35	4	2	9	69
Jumlah ASN Perempuan	1	17	43	2	8	2	73
Total	1	36	78	6	10	11	142

Tabel 2
Jumlah ASN dan PPPK Berdasarkan Golongan

JUMLAH ASN	GOLONGAN													TOTAL
	IV.d	IV.c	IV.b	IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	II.c	II.b	II.a	Ahli Pertama	
Jumlah ASN Laki-Laki	1	2	5	5	23	10	8	10	1	2	1	-	-	68
Jumlah ASN Perempuan	-	-	3	5	33	9	3	5	1	6	-	-	-	65
Jumlah PPPK Laki-Laki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
Jumlah PPPK Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4

Tabel 3
Jumlah ASN Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)		JUMLAH	Persentase
		L	P		(%)
1	Sekretariat	11	21	32	22,54
2	Bidang Perikanan Budidaya	7	7	14	09,86
3	Bidang Perikanan Tangkap	5	9	14	09,86
4	Bidang P2HKP	2	11	13	09,15
5	Bidang Kelautan dan Pengawasan	7	7	14	09,86
6	UPT Budidaya Perikanan	11	4	15	10,56
7	UPT Pelabuhan Perikanan	7	2	9	06,34
9	UPT PMHP	4	3	7	04,93
10	UPT Pengawasan SDKP Wilayah I	5	3	8	05,63
11	UPT Pengawasan SDKP Wilayah II	6	1	7	04,93
12	UPT Pengawasan SDKP Wilayah III	8	1	9	06,34
	Jumlah	73	69	142	100

BAB II

KONDISI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU

2.1 Keadaan Umum

Perencanaan kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Hal ini memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Data Sektoral Team Series pada 5 Tahun terakhir dapat digambarkan seperti table dibawah ini:

Tabel 4
Rekapitulasi Data Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Provinsi Riau Per Kabupaten/Kota Tahun 2020 s/d 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Provinsi Riau (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indragiri Hilir	55.712,90	56.225,95	57.267,44	57.416,11	44.857,41
2.	Rokan Hilir	64.692,03	66.544,76	66.212,34	66.833,50	65.531,36
3.	Bengkalis	7.013,54	8.000,04	11.513,62	6.033,59	10.475,27
4.	Siak	2.884,42	2.994,99	3.323,28	3.396,22	3.417,01
5.	Kepulauan Meranti	2.418,70	2.676,45	3.202,29	3.481,70	3.822,40
6.	Dumai	1.272,30	1.392,61	1.814,32	1.710,95	1.643,22
7.	Pelalawan	12.644,08	14.140,87	13.970,61	13.372,53	12.276,19
8.	Kampar	54.687,98	59.409,67	67.585,12	70.574,93	67.001,08
9.	Indragiri Hulu	9.784,18	10.200,18	10.275,17	12.539,24	12.552,66
10.	Rokan Hulu	8.902,04	9.021,35	9.306,74	9.306,70	7.964,10
11.	Kuantan Singingi	4.488,70	4.857,09	5.159,71	5.836,94	7.017,39
12.	Pekanbaru	9.626,06	9.837,99	9.998,49	10.004,57	9.103,55
TOTAL		234.126,93	245.301,95	259.629,13	260.506,98	245.661,64
Kenaikan/Penurunan (%)		-4,91	4,77	5,84	0,34	-6,04

Tabel 5
Data Hasil Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020 s/d 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	Hasil Produksi Perikanan Pembesaran Budidaya (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Indragiri Hilir	1.417,52	1.731,47	2.511,87	3.806,84	4.406,97
2.	Rokan Hilir	11.425,90	11.588,40	11.676,41	11.732,28	12.180,33
3.	Bengkalis	1.065,60	2.103,89	5.444,11	3.265,75	4.401,82
4.	Siak	1.100,49	1.167,16	1.191,78	1.304,67	1.336,93
5.	Kepulauan Meranti	107,18	137,09	202,69	328,02	336,49
6.	Dumai	293,78	317,23	382,69	316,78	362,95
7.	Pelalawan	7.398,46	7.707,10	7.355,00	6.645,11	6.584,54
8.	Kampar	51.895,63	56.985,79	65.167,80	68.119,27	64.635,14
9.	Indragiri Hulu	3.889,62	4.087,49	4.410,67	6.598,90	6.465,14
10.	Rokan Hulu	6.957,82	7.056,45	7.324,21	7.341,84	5.970,45
11.	Kuantan Singingi	4.070,05	4.454,70	4.752,13	5.369,45	6.528,62
12.	Pekanbaru	9.532,05	9.741,00	9.900,14	9.904,63	9.004,70
TOTAL		99.154,17	107.077,77	120.319,50	124.733,54	122.214,08

Tabel 6
Data Produksi Perikanan Tangkap (Hasil Tangkapan Laut, Pelabuhan dan Perairan Umum Daratan) Kabupaten/Kota Tahun 2020 s/d 2024

No	Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap (Hasil Tangkapan Laut, Pelabuhan dan Perairan Umum Daratan) (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indragiri Hilir	54.295,38	54.494,47	54.755,57	53.609,27	40.450,44
2.	Rokan Hilir	53.266,13	54.956,36	54.535,93	55.101,22	53.351,03
3.	Bengkalis	5.947,94	5.896,15	6.069,51	2.767,83	6.073,45
4.	Siak	1.783,93	1.827,83	2.131,50	2.091,55	2.080,08
5.	Kepulauan Meranti	2.311,52	2.539,36	2.999,60	3.153,68	3.485,91
6.	Dumai	978,52	1.075,38	1.431,63	1.394,16	1.280,27
7.	Pelalawan	5.245,62	6.433,77	6.615,61	6.727,42	5.691,65
8.	Kampar	2.792,35	2.423,88	2.417,32	2.455,66	2.365,94
9.	Indragiri Hulu	5.894,56	6.112,70	5.864,50	5.940,34	6.087,52
10.	Rokan Hulu	1.944,22	1.964,90	1.982,53	1.964,86	1.993,65
11.	Kuantan Singingi	418,65	402,39	407,58	467,49	488,77
12.	Pekanbaru	94,01	96,99	98,35	99,94	98,85
Total		134.972,83	138.224,15	139.309,64	135.773,42	123.447,56

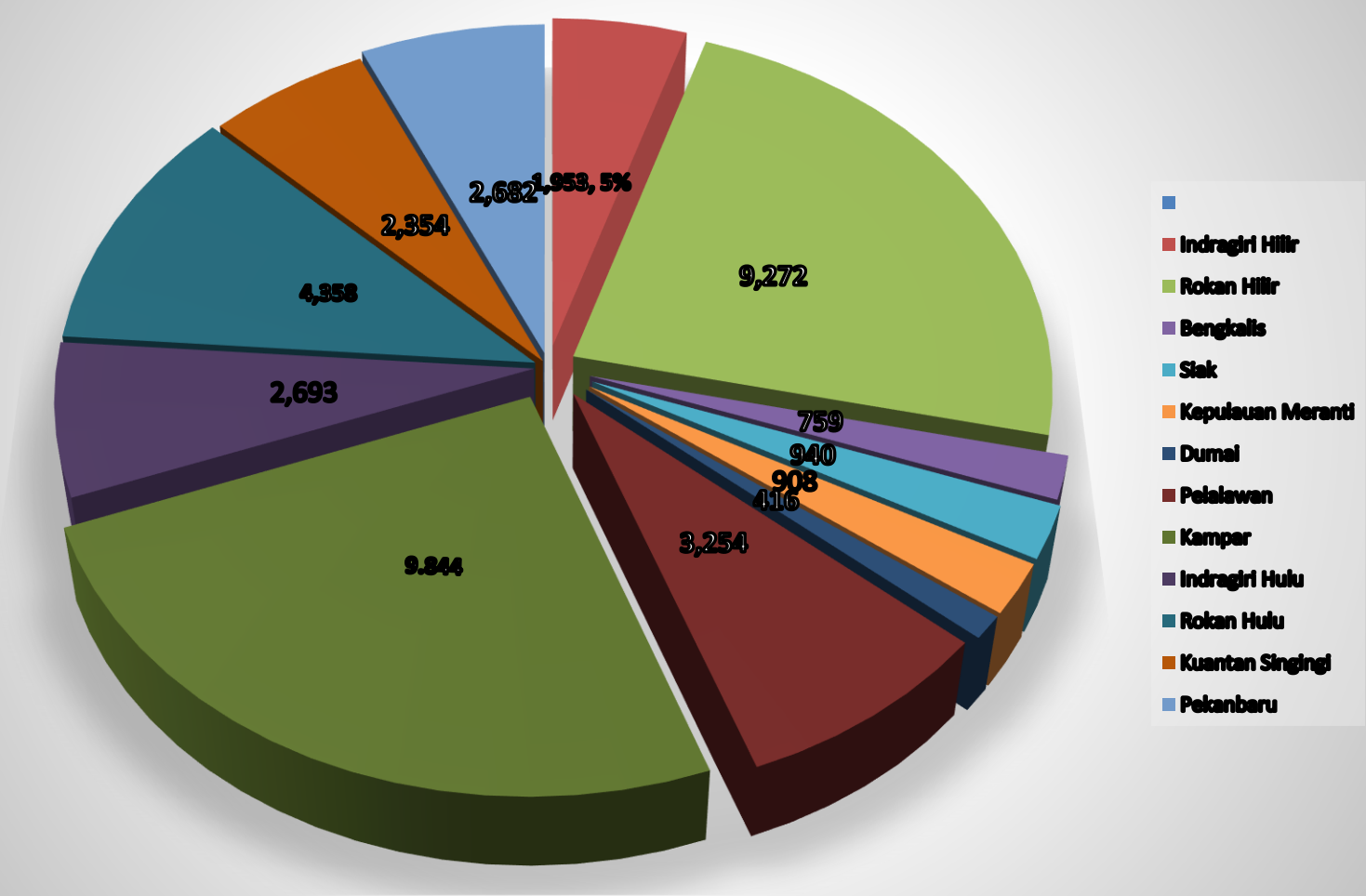
Tabel 7
Data Produksi Pengolahan Tahun 2020 s/d 2024

No	Kabupaten/Kota	Produksi Pengolahan (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indragiri Hilir	31,98	39,00	49,84	66,16	81,49
2.	Rokan Hilir	11.193,65	11.207,00	11.487,31	11.101,59	11.668,38
3.	Bengkalis	74,26	105,00	138,81	108,75	96,02
4.	Siak	34,45	32,00	33,46	32,90	34,88
5.	Kepulauan Meranti	658,63	804,00	803,07	802,66	802,79
6.	Dumai	27,93	24,00	1.504,80	895,92	833,56
7.	Pelalawan	281,65	269,00	359,25	331,86	312,11
8.	Kampar	8.515,61	11.689,00	14.550	12.030,30	1.409,90
9.	Indragiri Hulu	2,82	3,00	3,17	5,52	6,38
10.	Rokan Hulu	20,58	36,00	49,97	40,67	30,66
11.	Kuantan Singingi	17,06	35,00	39,56	65,36	66,49
12.	Pekanbaru	91,38	172,00	269,50	243,58	167,04
TOTAL		20.950,00	24.416,00	29.288,28	25.725,26	15.509,70

Tabel 8
Data Jumlah Pembudidaya Ikan Tahun 2020 s/d 2024

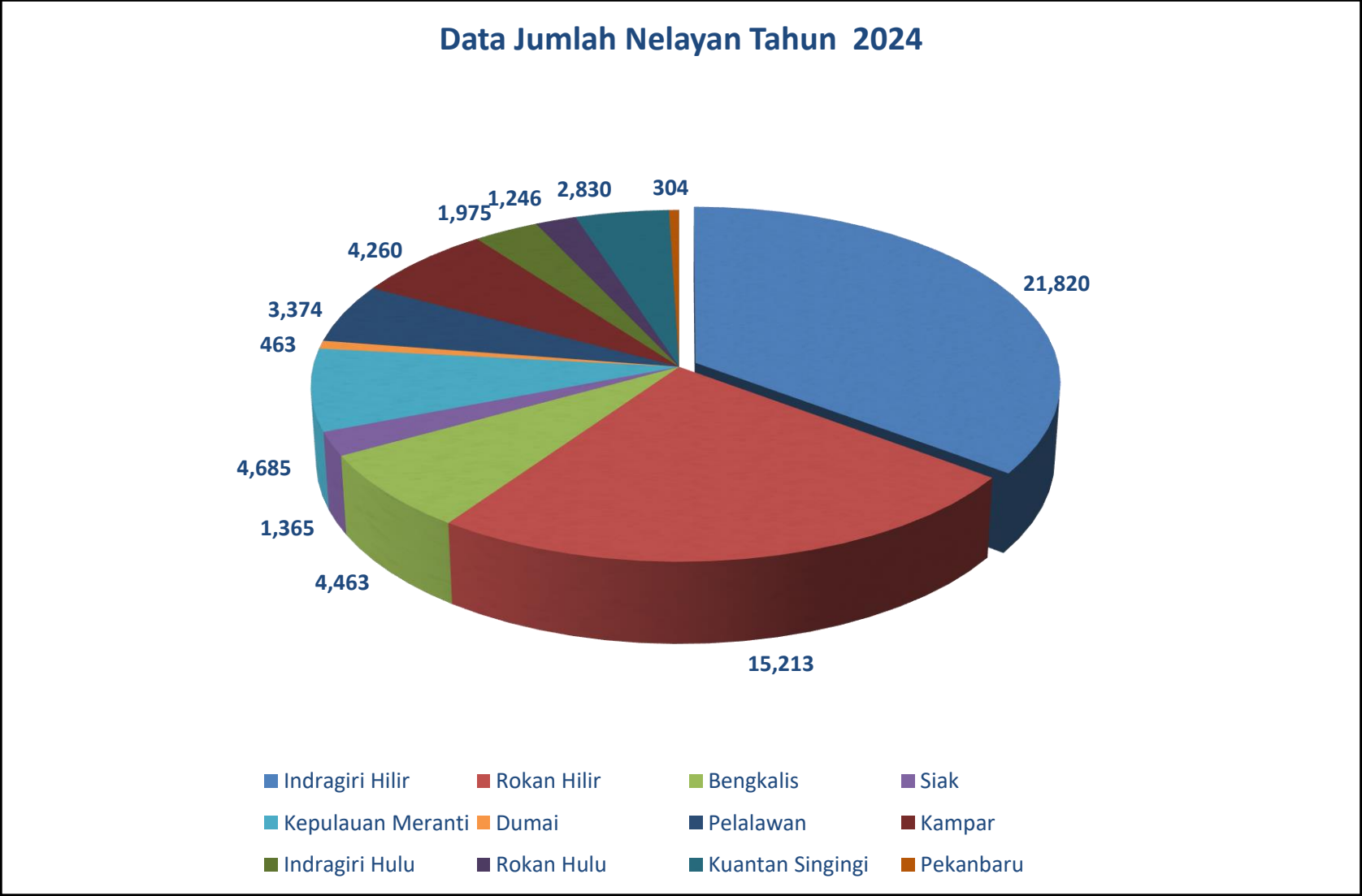
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidaya Ikan (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indragiri Hilir	2.058	2.070	1.953	1.953	1.953
2.	Rokan Hilir	9.265	9.272	9.272	9.272	9.272
3.	Bengkalis	465	651	744	1.148	759
4.	Siak	828	890	810	940	940
5.	Kepulauan Meranti	618	707	818	738	908
6.	Dumai	242	274	311	347	416
7.	Pelalawan	3.934	4.014	4.014	3.254	3.254
8.	Kampar	5.979	10.795	10.805	9.844	9.844
9.	Indragiri Hulu	2.675	2.675	2.675	2.693	2.693
10.	Rokan Hulu	3.967	4.067	4.338	4.358	4.358
11.	Kuantan Singingi	2.148	2.283	2.344	2.344	2.354
12.	Pekanbaru	2.675	2.676	2.674	2.682	2.682
TOTAL		34.854	40.374	40.858	39.573	39.433

Data Jumlah Pembudidaya Ikan Tahun 2024



Tabel 9
Data Jumlah Nelayan Tahun 2020 s/d 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan (Orang)														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Laut	Perairan Umum	Total	Laut	Perairan Umum	Total	Laut	Perairan Umum	Total	Laut	Perairan Umum	Total	Laut	Perairan Umum	Total
1.	Indragiri Hilir	3.795	6.767	10.562	9.098	7.413	16.511	9.098	7.430	16.511	17.738	4.686	22.424	17.660	4.160	21.820
2.	Rokan Hilir	15.560	2.778	18.338	15.923	2.873	18.796	16.653	2.408	19.061	12.805	2.408	15.213	12.805	2.408	15.213
3.	Bengkalis	5.572	917	6.489	6.935	957	7.892	7.032	759	7.791	3.263	559	3.822	3.611	852	4.463
4.	Siak	314	974	1.288	273	974	1.247	273	974	1.247	273	1.034	1.307	273	1.092	1.365
5.	KepulauanMeranti	4.663	-	4.663	4.375	-	4.375	4.631	-	4.631	4.635	-	4.635	4.685	-	4.685
6.	Dumai	612	-	612	371	-	371	382	-	382	405	-	405	463	-	463
7.	Pelalawan	363	2.654	3.017	363	2.573	2.936	474	2.852	3.326	474	2.880	3.354	474	2.900	3.374
8.	Kampar	-	6.736	6.736	-	2.998	2.998	-	4.406	4.406	-	4.033	4.033	-	4.260	4.260
9.	Indragiri Hulu	-	1.582	1.582	-	1.628	1.628	-	1.606	1.606	-	1.617	1.617	-	1.975	1.975
10.	Rokan Hulu	-	1.145	1.145	-	1.245	1.245	-	1.284	1.284	-	1.245	1.245	-	1.246	1.246
11.	KuantanSingingi	-	2.984	2.984	-	2.050	2.050	-	2.050	2.050	-	6.138	6.138	-	2.830	2.830
12.	Pekanbaru	-	467	467	-	347	347	-	319	319	-	310	310	-	304	304
Total		30.879	27.004	57.883	37.338	23.058	60.396	38.526	24.088	62.614	39.593	24.893	64.486	39.971	22.027	61.998



Tabel 10
Data Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro Tahun 2020 s/d 2024

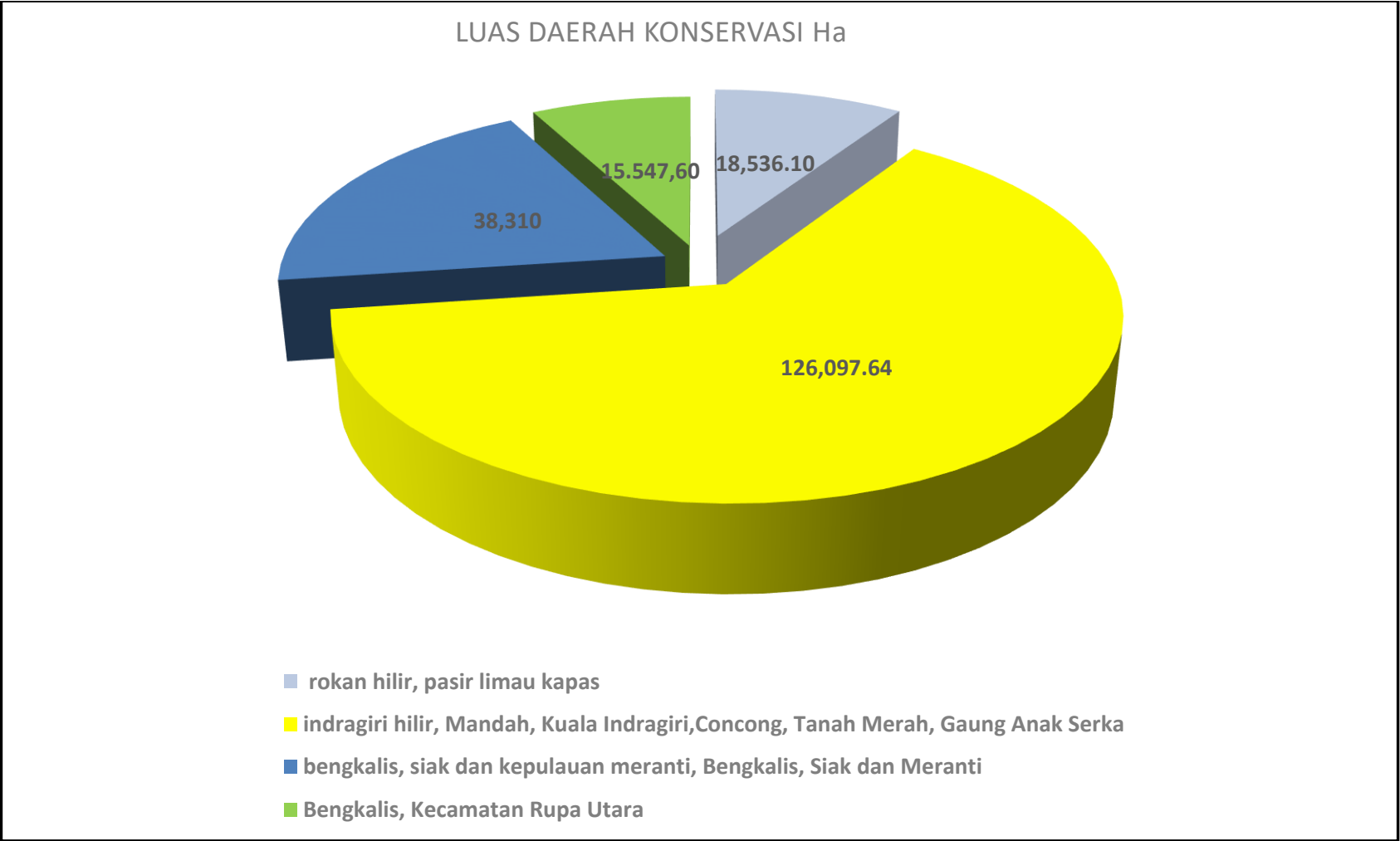
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro(Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indragiri Hilir	60	61	70	79	93
2.	Rokan Hilir	53	53	53	53	53
3.	Bengkalis	44	70	72	76	83
4.	Siak	25	26	26	26	26
5.	Kepulauan Meranti	640	640	640	400	400
6.	Dumai	39	39	46	45	46
7.	Pelalawan	61	57	63	63	68
8.	Kampar	57	54	60	47	67
9.	Indragiri Hulu	9	10	10	8	8
10.	Rokan Hulu	22	19	15	18	18
11.	Kuantan Singingi	12	12	76	82	77
12.	Pekanbaru	81	84	92	101	45
TOTAL		778	1.125	1.223	998	984

Tabel 11
Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Tahun 2020 s/d 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya(Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indragiri Hilir	541	631	595	595	596
2.	Rokan Hilir	2.541	2.546	2.546	2.556	2.556
3.	Bengkalis	241	205	243	259	196
4.	Siak	611	671	681	691	691
5.	Kepulauan Meranti	618	707	818	738	908
6.	Dumai	242	274	311	347	372
7.	Pelalawan	1.967	2.007	2.007	1.627	1.627
8.	Kampar	5.979	6.016	6.024	4.761	4.761
9.	Indragiri Hulu	2.565	2.565	2.565	2.565	2.565
10.	Rokan Hulu	3.967	4.067	4.338	4.358	4.358
11.	Kuantan Singingi	2.148	2.283	2.344	2.344	2.354
12.	Pekanbaru	2.675	2.676	2.674	2.682	2.682
TOTAL		24.095	24.648	25.146	23.523	23.666

Tabel 12
Data Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

No	Nama Kawasan	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Luas Kawasan Konservasi (Ha)	Target Konservasi	Status Penetapan / Pencadangan		Target Penetapan	Rencana Pengelolaan
						Pencadangan	Penetapan		Draf / Ditetapkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kawasan Konservasi Perairan di Kepulauan Aruah di Kabupatem Rokan Hilir Provinsi Riau	Rokan Hilir	Pasar Limau Kapas	18.536,10 Ha	Penyu, Terumbu Karang dan Ikan Karang	Kpts. 863/XI/2017	Kepmenkp No. 73, Tahun 2021		Ditetapkan
2.	Kawasan Konservasi Perairan di Indragiri Hilir Provinsi Riau	Indragiri Hilir	1. Mandah 2. Kuala Indragiri 3. Concong 4. Tanah Merah 5. Gaung Anak Serka	126.097,64 Ha	Udang Nenek, Pesut, Ikan Tirusan	Kpts. 863/XI/2017	Kepmenkp No.107, Tahun 2023		Ditetapkan
3.	Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Terubuk	Bengkalis, Siak dan Meranti	Bengkalis, Siak dan Meranti	38.310 Ha	Ikan Terubuk	Pergub Riau No. 78 Tahun 2012		2024	Belum
4.	Kawasan Konservasi Taman Pesisir	Bengkalis	Kecamatan Rupat Utara	15.547,60 Ha	Lamun, Dugong	Kpts. 565/II/2019		2024	Belum



2.2 Keragaan Data Perikanan dan Kelautan

2.2.1 Budidaya Perikanan

Total Pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Bidang Perikanan Budidaya dan UPT Budaya Perikanan, total anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 8.204.628.139,-, dengan realisasi anggaran Rp.4.346.981.263,- atau 52,86%. Dari realisasi diatas menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk optimalisasi penggunaan anggaran, mengingat lebih dari 47% anggaran belum terserap.

Capaian realisasi anggaran sebesar 52,86% mengindikasikan adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat penyerapan anggaran, serta merumuskan strategi percepatan dan perbaikan dalam pelaksanaan program kerja ke depannya untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih optimal.

Bidang Perikanan Budidaya,

Bidang Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan di wilayah Provinsi Riau. Sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi berbasis sumber daya perairan, bidang ini mengemban tanggung jawab strategis untuk memastikan keberlangsungan dan kemajuan sektor budidaya perikanan di laut serta lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi.

Pada tahun 2024, Bidang Budidaya Perikanan berfokus pada dua program utama yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan:

- Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut, air payau dan air tawar.

Bidang Budidaya Perikanan juga bertanggung jawab dalam penjaminan ketersediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di laut, air payau dan air tawar. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar, serta memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut dapat mendukung kegiatan usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut
Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya merupakan salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam kegiatan budidaya ikan di laut.

Bidang ini memastikan bahwa pemantauan kesehatan ikan dilakukan secara berkala untuk mencegah dan mengatasi gangguan atau penyakit yang dapat merugikan produksi budidaya. Selain itu, pengelolaan lingkungan yang baik juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta mengurangi dampak negatif terhadap habitat ikan.

- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi.

Bidang ini juga melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembudidaya ikan di laut serta kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah. Pembinaan dan pemantauan bertujuan untuk memberikan pelatihan dan arahan kepada pembudidaya ikan agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha budidaya mereka, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut.

Dengan segala upaya yang dilakukan oleh bidang ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem perikanan yang seimbang, mendukung pembangunan ekonomi daerah, serta berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya laut di Provinsi Riau, memiliki program:

- Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Rp. 1.898.585.138,- , realisasi Rp 340.547.178,-, atau 17,76%, adapun kegiatan yang mendukung capaian kinerja yaitu:
 1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
 - a. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
 2. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - a. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
 - a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
 - b. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Provinsi

UPT Budidaya Perikanan

UPT Budidaya Perikanan berkedudukan di Pekanbaru dengan memiliki 6 (enam) instalasi, yaitu:

1. BBIS (Balai Benih Ikan Sentral) Sei Tibun kab Kampar;
2. Unit Pendederan Ikan Air Tawar Dempond Kab Kampar;
3. BAT (Balai Air Tawar) Rumbai Kota Pekanbaru;
4. BAP (Balai Air Payau) Sei Suir Selat Panjang Kab. Meranti;
5. Balai Benih Ikan Pantai Pulau Rupa kab Bengkalis;
6. Stasiun Penangkaran Ikan Terubuk/ KJA Penebal Kab Bengkalis.

Dengan mendukung Misi Gubernur sebagai berikut:

- Menyediakan benih/benur bermutu dan induk unggul yang berstandarisasi;
- Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya;
- Menyediakan informasi dan alih teknologi perikanan budidaya;
- Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan

Dengan Pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Rp. 6.306.043.001,-, realisasi Rp. 4.006.434.085,- atau 63,53%., memiliki Program:

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Sekretariat), pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Rp. 1.687.054.142,-, dengan realisasi Rp. 1.637.132.806,- atau 97,04%
- Pengelolaan Perikanan Budidaya, pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Rp. 4.618.988.859,-, dengan realisasi Rp. 2.369.301.279,- atau 51,29%

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota (DAK)

Untuk indikator capaian kinerja Program Perikanan Budidaya yaitu Jumlah produksi hasil perikanan budidaya dengan target pada tahun 2024 adalah 131.389,52 ton dengan realisasi 122.214,08 ton (93,02%).

Tabel 13
 Data Perkembangan Luas Lahan Perikanan Budidaya Menurut Jenis Pembesaran Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pembesaran	Luas Lahan (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laut	114,20	114,20	114,50	125,00	125,00
2	Jaring Apung Laut	0,49	0,47	0,52	0,59	0,59
3	Jaring Tawar	11,01	26,26	21,78	20,35	20,35
4	Jaring Tancap Tawar	0,20	0,33	0,39	0,43	0,43
5	Keramba	4,13	22,13	19,61	17,73	17,73
6	Kolam Air Tenang	1.607,51	1.744,83	1.417,96	1.371,80	1.371,80
7	Tambak Semi Intensif	15,56	101,26	-	-	-
8	Tambak Intensif	12,69	35,83	258,52	369,11	369,11
9	Tambak Sederhana	528,72	604,77	512,44	567,00	567,00
10	Mina Padi	-	-	-	-	-
TOTAL		2.294,50	2.650,06	2.345,73	2.472,03	2.472,03

Sumber Data: 1. Data Potensi dan Alokasi dari Kabupaten/Kota (Sumber Data Surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota Tahun 2021)
 2. Data Pemanfaatan (Sumber Data Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2021)

Tabel 13
Data Komuditas Unggulan Budidaya Hasil Kesepakatan Kabupaten/Kota Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Komoditas Unggulan Tahun 2022
1.	Indragiri Hilir	Kepiting Bakau, Udang Vanname dan Kerang Darah
2.	Rokan Hilir	Kerang Darah, Udang Vanname, Selais, Baung, Patin dan Nila
3.	Bengkalis	Udang Vanname dan Kakap Putih
4.	Siak	Nila, Patin dan Lele
5.	Kepulauan Meranti	Kakap Putih, Bawal Bintang, Udang Vanname, Nila Salin, Kepiting Bakau, dan Kerang Darah
6.	Dumai	Udang Vanname, Bandeng, Kakap, Nila Salin, dan Kepiting Bakau
7.	Pelalawan	Baung, Tapah, Patin, Udang Vanname, Udang Galah, Patin Kualo
8.	Kampar	Patin, Mas, Lele, Jelawat, Baung, Nila, Belida, Tapah
9.	Indragiri Hulu	Nila, Lele, Patin, dan Baung
10.	Rokan Hulu	Lele dan Nila
11.	Kuantan Singingi	Nila, Patin, Lele, Baung, Ikan Hias
12.	Pekanbaru	Lele, Patin dan Ikan Hias

Sumber Data : Hasil berita Acara Kesepakatan Antara Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Riau dengan Dinas Perikanan Kabupaten/kota(Berita acara Tanggal 27 Oktober Tahun 2020) dan (Berita Acara Tanggal 14 April 2022 Pada Forum Perangkat Daerah)

Tabel 14
Data Jenis Usaha Budidaya Pembesaran Provinsi Riau Tahun 2024

No.	Kabupaten/ Kota		Jenis Usaha Pembesaran	RTP (Unit)	Jumlah Pembudidaya (Orang)	Luas Lahan (m ²)	Luas Lahan (H)
	PROVINSI RIAU	1.	Jaring Apung Laut				
		1.	Kab. Kepulauan Meranti	388	388	6.456	0,65
		2.	Jaring Apung Tawar				
		1.	Kab. Indragiri Hilir	2	12	500	0,05
		2.	Kab. Kampar	32	136	178.000	17,80
		3.	Kota Pekanbaru	21	21	1.404	0,14
		4.	Kab. Pelalawan	125	250	11.520	1,15
		5.	Kab. Rokan Hilir	68	340	820	0,08
		6.	Kab. Rokan Hulu	178	178	10.743	1.07
		7.	Kab. Siak	6	60	550	0,06
		3.	Jaring Tancap Tawar				
		1.	Kota Dumai	56	77	3.455	0,35
		2.	Kab. Siak	35	40	1.100	0,11
		4.	Karamba				
		1.	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-
		2.	Kab. Indragiri Hulu	243	243	670	0,07
		3.	Kab. Kampar	977	2.862	167.000	16,70
		4.	Kota Dumai	-	-	-	-
		5.	Kab. Kuantan Singingi	114	114	3.600	0,36
		6.	Kab. Pelalawan	218	436	6.156	0,62
		5.	Kolam Air Tenang				
		1.	Kab. Bengkalis	101	184	54.500	5,45
		2.	Kab. Indragiri Hilir	514	1.704	58.650	5,87
		3.	Kab. Indragiri Hulu	2.322	2.450	157.170	15,72
		4.	Kab. Kampar	3.752	6.846	10.297.000	1.029,70
		5.	Kab. Kep Meranti	510	510	6.977	0,70
		6.	Kota Dumai	225	240	41.456	4,15
		7.	Kota Pekanbaru	2.661	2.661	2.141.037	214,10
		8.	Kab. Kuantan Singingi	2.240	2.240	3.370.000	337,00
		9.	Kab. Pelalawan	1.244	2.488	482.100	48,21
		10.	Kab. Rokan Hilir	990	2.940	487.060	48,71
		11.	Kab. Rokan Hulu	4.180	4.180	3.468.265	346,83
		12.	Kab. Siak	620	780	420.600	42,06
		6.	Laut Lainnya				

		1.	Kab. Rokan Hilir	1.498	5.992	1.250.000	125,00
		7.	Tambak Intensif				
		1.	Kab. Bengkalis	95	575	3.033.000	303,30
		2.	Dumai	70	71	33.077	3,31
		3.	Siak	30	60	40.000	4.00
		8.	Tambak Sederhana				
		1.	Kab. Bengkalis	-	-	-	-
		2.	Kab. Indragiri Hilir	80	237	4.240.230	424,02
		3.	Dumai	21	28	591.331	59,13
		4.	Kab. Kep. Meranti	-	-	-	
		5.	Pelalawan	40	80	810.000	81,00
		9.	Tambak Semi Intensif				
		1.	Kab. Kep. Meranti	10	10	10.450	1,05
		Total		23.666	39.433	31.384.877	3.138,49

Sumber Data : Hasil Validasi Nasional pada Aplikasi Desktop Satu Data KKP

Tabel 15
Data Jumlah Rumah Tangga Pembenihan Tahun 2020 s/d 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Pembenihan(Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indragiri Hilir	32	36	36	36	36
2.	Rokan Hilir	20	20	20	20	20
3.	Bengkalis	14	9	17	12	12
4.	Siak	5	18	16	16	16
5.	Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-
6.	Dumai	16	16	16	16	14
7.	Pelalawan	16	15	19	20	19
8.	Kampar	459	461	447	483	483
9.	Indragiri Hulu	-	-	15	18	18
10.	Rokan Hulu	22	22	22	22	22
11.	Kuantan Singingi	36	35	43	40	38
12.	Pekanbaru	85	104	119	109	109
TOTAL		705	736	770	792	787

Lampiran I

Dokumentasi Kegiatan Bidang Perikanan Budidaya dan UPT Budidaya

Tahun Anggaran 2024



SerahTerima Spat Benih Kerang Darah



Pengambilan Sampel Benih



Penyerahan Bibit Ikan kepada Kelompok Masyarakat Budidaya Tahun 2024 (Pokdakan Fajar Jaya)



Penyerahan Bibit Ikan kepada Pondok Pesantren Al-Kautsar

2.2.2 Perikanan Tangkap

Total Pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Bidang Perikanan Tangkap dan UPT. Pelabuhan Perikanan sebesar Rp. 27.494.322.517,- dengan realisasi Rp. 23.962.199.896,- atau 87,15%.

Dari capaian kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian realisasi ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan di bidang perikanan tangkap serta operasional UPT. Pelabuhan Perikanan.

Tingkat realisasi sebesar 87,15% mengindikasikan bahwa mayoritas program kerja yang direncanakan telah berhasil dilaksanakan, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap sebesar 12,85%. Capaian ini mencerminkan upaya yang baik dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Bidang Perikanan Tangkap dengan Pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun Rp. 10.055.812.713,- Realisasi Rp. 7.821.140.735,- atau 77,78%, memiliki Program:

- Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan Pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun Rp. 10.055.812.713,- Realisasi Rp. 7.821.140.735,- atau 77,78%, dengan kegiatan:

Adapun kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung capaian kinerja yaitu:

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
4. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - a. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

UPT Pelabuhan Perikanan nilai pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 17.438.509.804,-, realisasi Rp. 16.141.059.160,54,- atau 92,56%, memiliki Program:

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Sekretariat), dengan Pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Rp. 724.282.804,- Realisasi Rp. 720.640.352,- atau 99,50%,
- Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan Pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Rp. 16.714.227.000,- Realisasi Rp. 15.420.418.808,54,- atau 92,26%,

Adapun kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung capaian kinerja yaitu:

1. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (DAK)
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Target indikator capaian kinerja Produksi Perikanan Tangkap (ton) pada tahun 2024 adalah 157.199,87 ton realisasi 123.447,55 ton (78,53%).

Tabel 16
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada Provinsi Riau

No.	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)	Wilayah Provinsi	Wilayah Kabupaten/Kota	Potensi (Ton)	Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan (Ton)	Kelompok Sumber Daya Ikan
1	WPPNRI 571	Aceh, Sumatera Utara , Riau	Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Kepulauan Meranti, Siak			
	Selat Malaka dan Laut Andaman			157.151	141.436	Ikan Pelagis Kecil
				75.095	37.548	Ikan Pelagis Besar
				230.000	115.000	Ikan Demersal
				34.514	31.066	Ikan Karang
				47.610	23.805	Udang Penaeid
				477	239	Lobster
				10.870	5.435	Kepiting
				2.906	2.034	Rajungan
				32.511	22.758	Cumi-cumi
				Total		
2	WPPNRI 711	Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah	Indragiri Hilir, Pelalawan			
	Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan			536.917	375.842	Ikan Pelagis Kecil
				163.744	114.621	Ikan Pelagis Besar
				289.300	202.510	Ikan Demersal
				197.580	138.306	Ikan Karang
				71.810	50.267	Udang Penaeid
				1.467	734	Lobster
				3.388	1.694	Kepiting
				9.804	4.902	Rajungan
				32.369	22.658	Cumi-cumi
				Total		

Sumber Data : Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Tabel 17
Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap (RTP)											
		2021			2022			2023			2024		
		Laut	Peraian Umum	Total	Laut	Perairan Umum	Total	Laut	Perairan Umum	Total	Laut	Perairan Umum	Total
1.	Indragiri Hilir	3.197	2.143	5.340	3.207	2.154	5.361	6.029	2.193	8.222	5.951	1.985	7.936
2.	Rokan Hilir	3.822	1.326	5.148	3.962	1.232	5.194	3.059	1.232	4.291	3.059	1.232	4.291
3.	Bengkalis	3.409	957	4.366	3.252	759	4.011	1.780	559	2.339	1.789	852	2.641
4.	Siak	273	974	1.247	273	974	1.247	273	1.034	1.307	273	1.092	1.365
5.	Kepulauan Meranti	2.977	-	2.977	3.038	-	3.038	3.040	-	3.040	3.092	-	3.092
6.	Dumai	353	-	353	372	-	372	389	-	389	459	-	459
7.	Pelalawan	313	2.573	2.886	424	2.852	3.276	424	2.880	3.304	424	2.900	3.324
8.	Kampar	-	2.998	2.998	-	4.406	4.406	-	4.033	4.033	-	4.160	4.160
9.	Indragiri Hulu	-	1.628	1.628	-	1.606	1.606	-	1.617	1.617	-	1.975	1.975
10.	Rokan Hulu	-	1.245	1.245	-	1.245	1.245	-	1.245	1.245	-	1.246	1.246
11.	Kuantan Singingi	-	2.050	2.050	-	2.050	2.050	-	2.029	2.029	-	2.050	2.050
12.	Pekanbaru	-	347	347	-	319	319	-	310	310	-	304	304
TOTAL		14.344	16.241	30.585	14.528	17.597	32.125	14.994	17.115	32.109	15.047	17.796	32.843

Tabel 18
Jumlah Kapal Penangkapan Ikan di PUD (UNIT) Berdasarkan Data Statistik Tahun 2024

No	KAB/KOTA	NTP					PTM					MOTOR TEMPEL <10 GT					KAPAL MOTOR <10 GT					TOTAL
		Sungai	Rawa	Danau	Waduk	Genang an Air lain nya	Sungai	Rawa	Danau	Waduk	Genang an Air lain nya	Sungai	Rawa	Danau	Waduk	Genang an Air lain nya	Sungai	Rawa	Danau	Waduk	Genang an Air lain nya	
1	Bengkalis	-	-	-	-	-	331	-	-	-	47	380	-	-	-	69	-	-	-	-	-	827
2	Indragiri Hilir	--	-	-	-	-	453	-	-	-	-	1.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.747
3	Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	349	-	-	-	-	1.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.635
4	Kampar	-	--	-	-	-	1.125	-	-	110	-	1.962	-	-	346	-	-	-	-	-	-	3.543
5	Pekanbaru	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
6	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	505	275	70	75	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.155
7	Pelalawan	-	-	-	-	-	813	-	-	-	-	2.051	--	-	-	-	-	-	-	-	-	2.864
8	Rokan Hilir	--	-	-	-	-	27	-	27	-	-	1.122	-									1.176
9	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	395	-	139	-	-	177										711
10	Siak	-	-	-	-		25	-	-	-	-	863	-	75		129						1.092
TOTAL		--	-	-	-	-	4.198	275	236	185	47	9.554	-	75	346	198						15.114

Lampiran II

Dokumentasi Kegiatan Bidang Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Tahun Anggaran 2024



Penyerahan Kapal Fiber 1 GT Mesin Ketingting di Kab. Rokan Hulu



Penyerahan Alat Penangkapan Ikan di Kota Dumai



Cold storage di UPT. Pelabuhan

2.2.3 Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (P2HKP)

Total Pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Bidang Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (P2HKP) dan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) sebesar Rp. 915.171.998,- dengan realisasi Rp. 722.713.942,- atau 99,72%.

Pencapaian realisasi yang hampir mencapai 100% ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran.

Tingkat realisasi yang sangat tinggi ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi yang optimal dalam pelaksanaan program-program kerja yang telah direncanakan. Dengan serapan anggaran yang mencapai 99,72%, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh program dan kegiatan yang direncanakan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dalam pengelolaan anggaran.

Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (P2HKP), memiliki Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan Pagu Rp. 322.625.000,- dengan realisasi Rp. 131.835.720,- atau 40,86%, dengan kegiatan:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.
2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 1. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) dengan pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Rp. 592.546.998,- dengan realisasi Rp. 590.878.222,- atau 99,72%, memiliki program:

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pagu anggaran Rp. 442.234.990,-
- Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan pagu anggaran Rp. 150.312.008,-

Kegiatan dan sub kegiatan teknis:

- 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - a. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing

Untuk indikator capaian kinerja Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap yaitu jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan dengan target pada tahun 2024 adalah 19.738,45 ton dengan realisasi 15.509,68 ton atau 78,58%

Tabel 19
Data Angka Capaian Kosumsi Ikan Tahun 2020 s/d 2024

No.	Kabupaten/Kota	Angka konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Indragiri Hilir	42,90	43,89	43,80	44,02	44,02
2.	Rokan Hilir	55,29	50,73	54,14	51,97	51,97
3.	Bengkalis	41,39	39,59	42,15	47,72	47,72
4.	Siak	48,91	41,80	45,50	46,36	46,36
5.	Kepulauan Meranti	53,12	52,60	53,73	53,95	53,95
6.	Dumai	44,75	45,19	49,64	44,83	44,83
7.	Pelalawan	45,84	46,44	48,16	50,12	50,12
8.	Kampar	43,17	40,88	43,38	40,57	40,57
9.	Indragiri Hulu	41,64	41,96	42,19	41,05	41,05
10.	Rokan Hulu	41,10	41,23	44,23	42,15	42,15
11.	Kuantan Singingi	39,71	41,54	41,69	43,11	43,11
12.	Pekanbaru	45,89	46,46	49,89	44,72	44,72
	Provinsi Riau	45,28	44,28	46,52	45,87	45,87
	Nasional	54,56	58,08	57,27	61,02	61,02

Lampiran III

Dokumentasi Kegiatan Bidang Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tangkap (P2HKP)
Tahun Anggaran 2024



Pelaksanaan Lomba Masak Serba Ikan



Produk Olahan dari Ikan



2.2.4 Kelautan dan Pengawasan, UPT Wilayah 1, 2, dan 3

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan bahwa setiap aktivitas yang dilaksanakan di ruang laut wajib mematuhi ketentuan RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Kesesuaian pemanfaatan ruang laut diwujudkan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), yang didasarkan pada materi teknis perairan pesisir yang telah terintegrasi antara RZWP3K dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

Untuk Provinsi Riau, proses integrasi dan harmonisasi antara RTRW dengan RZWP3K telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pada tanggal 21 Oktober 2024, telah dilaksanakan pembahasan lintas sektor dimana RTRW Provinsi Riau telah berhasil terintegrasi dengan materi teknis perairan pesisir dari dokumen final RZWP3K Provinsi Riau. Dokumen ini telah mencakup aspek Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam perencanaannya.

Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan efektivitas implementasi rencana revisi RTRWP yang telah terintegrasi dengan RZWP3K. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut yang optimal di wilayah Provinsi Riau, serta menjamin keselarasan antara berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang laut.

Total Pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Bidang Kelautan dan Pengawasan dan UPT. PSDKP Wilayah I, II dan III sebesar Rp. 4.211.409.897,- dengan realisasi Rp. 3.506.976.055,- atau 83,27%. Pencapaian realisasi diatas menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran untuk mendukung program pengawasan dan pengelolaan kelautan. Tingkat realisasi sebesar 83,27% mengindikasikan bahwa sebagian besar program kerja yang direncanakan telah berhasil dilaksanakan, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap sekitar 16,73%. Capaian ini mencerminkan upaya yang baik dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif untuk mencapai target-target pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang telah ditetapkan.

Bidang Kelautan dan Pengawasan dengan pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Rp. 1.614.927.630,- dengan realisasi Rp. 1.403.637.650,- atau 86,92%, memiliki Program:

- Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dengan Pagu Anggaran Rp. 1.013.287.630,- dengan realisasi Rp. 891.405.150 atau 87,97%, dengan kegiatan:
 - 1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - a. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (DAK)
 - b. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - a. Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dengan Pagu Anggaran Rp. 601.640.000,- dengan realisasi Rp. 512.232.500,- atau 85,14%, dengan kegiatan:
 - 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
 - b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
 - c. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - d. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)

UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP)

WILAYAH I dengan pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Rp. 649.209.995,- dengan realisasi Rp. 349.546.497,- atau 60,77%, memiliki program:

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Sekretariat) pagu anggaran Rp. 309.725.355,-, dengan realisasi Rp. 303.406.497,- atau 97,96%
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Pagu Anggaran Rp. 339.484.640,-, dengan realisasi Rp. 91.140.000,- atau 26,85%

Kegiatan dan sub kegiatan teknis:

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
 - a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
 - b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampaidengan 12 Mil

UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP)

WILAYAH II dengan pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Rp. 957.287.620,- dengan realisasi Rp. 902.228.620,- atau 94,25%, memiliki program:

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Sekretariat) pagu anggaran Rp. 321.433.620,- dengan realisasi Rp. 308.784.620,- atau 96,06%
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Pagu Anggaran Rp. 635.854.000,- dengan realisasi Rp. 593.444.000,- atau 93,33%

Kegiatan dan sub kegiatan teknis:

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
 - a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil

UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP)

WILAYAH III dengan pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 Rp. 989.984.652,- dengan realisasi Rp. 806.563.288,- atau 81,47%, memiliki program:

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Sekretariat) pagu anggaran Rp. 351.444.652,-, dengan realisasi Rp. 333.237.788,- atau 94,82 %
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Pagu Anggaran Rp. 638.540.000,- dengan realisasi Rp. 473.325.500,- atau 74,13 %

Kegiatan dan sub kegiatan teknis:

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil

Kegiatan APBD di Bidang Kelautan dan Pengawasan pada Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi sub kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan ini mempunyai output jumlah kawasan yang dipulihkan dengan target luasan 3 (tiga) Ha Pelaksanaan kegiatan ini dengan metode swakelola bekerjasama dengan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)

Kegiatan rehabilitasi terhadap hutan mangrove berfungsi untuk mengembalikan kelestarian lingkungan pesisir dan mengembalikan habitat flora dan fauna yang menggantungkan hidup pada hutan mangrove Pelaksanaan program rehabilitasi mangrove ini diharapkan dapat menciptakan suatu lingkungan ekosistem hutan mangrove yang baik dan berdaya fungsi untuk kehidupan di lingkungan dan masyarakat pesisir.

Faktor-faktor yang penting diperhatikan dalam penanaman mangrove antara lain: Tipe Substrat, Spesies Setempat, Pasang Surut Jarak tanam tergantung lokasi dan tujuan penanaman. Penanaman di pinggir laut dengan tujuan melindungi pantai dari abrasi atau sebagai jalur hijau, jarak tanamnya adalah 1 x 1 meter jumlah baris tanaman tergantung kondisi pantai, namun apabila lebih banyak maka semakin baik. Dengan semakin banyaknya tegakan tanaman akan semakin besar kemampuannya untuk melindungi pantai dari abrasi, semakin besar kemampuannya menyuburkan pantai, dan semakin banyak ruang untuk perlindungan dan tumbuh bagi biota air seperti ikan dan udang.

Jenis mangrove yang akan ditanam harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan lokasi penanaman, seperti kondisi tanah, salinitas dan faktor lain Pemilihan jenis pada setiap tapak adalah sebagai berikut :

1. Bakau (*Rhizophora spp*) dapat tumbuh dengan baik pada substrat berlumpu dan lumpu berpasir dipantai yang agak berombak dengan frekuensi genangan 20 – 40 kali perbulan
2. Api-api (*Avicenia spp*) lebih cocok ditanam pada substrat pasir berlumpur terutama di bagian terdepan pantai dengan frekuensi genangan 30–40 kali per bula

Tabel 20
Data Luas kawasan Konservasi

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan (Ha)					No Surat Keputusan	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Kab. Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti	40.816	40.816	40.816	38.310	38.310	Pergub Riau No. 78 Tahun 2012 Tanggal 28-12-2012	Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Terubuk (Siak, Meranti dan Bengkalis)
2.	Kab. Indragiri Hilir	205.595,64	205.595,64	205.595,64	126.097,64	126.097,64	Kpts.863/XI/2017 Tanggal 6-10-2017 KepmenKP Nomor 107 Tahun 2023 Tanggal 04 Oktober 2023	Kawasan Konservasi Perairan di Indragiri Hilir Kec. 1. Mandah 2. Kuala Indragiri 3. Concong 4. Tanah Merah 5. Gaung Anak Serka)
3.	Kab. Rokan Hilir	23.481,32	18.223,25	18.223,25	18.536,10	18.536,10	Kpts.863/XI/2017 Tanggal 6-10-2017 Kep MenKP Nomor 73 Tahun 2021 Tanggal 6 Juni 2023	Kawasan Konservasi Perairan di Kepulauan Aruah (Pasir Limau Kapas)
4.	Kab. Bengkalis	15.547,60	15.547,60	15.547,60	15.547,60	15.547,60	Kpts.565/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019	Kawasan Konservasi Taman Pesisir Rupert Utara (Kec. Rupert Utara)
TOTAL		285.440,56	280.182,49	280.182,49	198.490,74	198.491,34		Pengurangan Luasan Hasil Evaluasi KKP

Sumber Data : Bidang Kelautan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024

Tabel 21
Jumlah Kelompok Pengawas Perikanan Tahun 2020 s/d 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pengawas Perikanan (Kelompok)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indragiri Hilir	14	14	21	18	18
2.	Rokan Hilir	4	4	5	6	6
3.	Bengkalis	10	10	11	18	18
4.	Siak	2	2	2	2	2
5.	Kepulauan Meranti		5	5	7	7
6.	Dumai	5	5	5	6	6
7.	Pelalawan	17	17	17	17	17
8.	Kampar	14	14	14	14	14
9.	Indragiri Hulu	3	3	3	3	3
10.	Rokan Hulu	3	3	3	2	2
11.	Kuantan Singingi	11	11	10	16	16
12.	Pekanbaru	1	1	1	1	1
	Provinsi Riau	89	89	97	110	110

Sumber Data : SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Nomor : Kpts.523/KP-DKP/I/2020/02.1 Tanggal 03 Januari 2020 tentang Pembentukan POKMASWAS Kelautan dan Perikanan Se-Provinsi Riau

Lampiran IV

Dokumentasi Kegiatan Bidang Kelautan dan Pengawasan (KP)

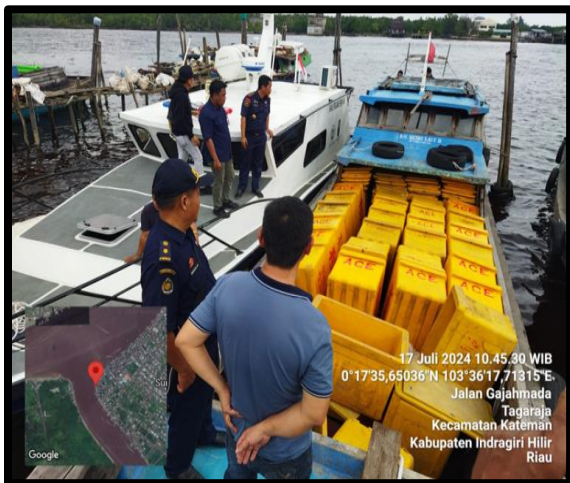
Tahun Anggaran 2024



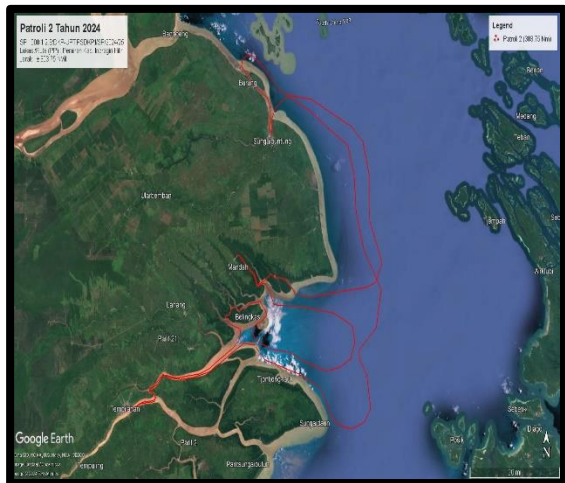
Mengadakan Survey Biofisik dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi di Perairan Indragiri Hilir



Melaksanakan Identifikasi Lokasi Penanaman Mangrove, di Kab. Kepulauan Meranti



Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai dengan 12 Mil , (UPT Wil. I)



Peta Rute Patroli (UPT Wil. I)



Pengawasan Bersama terkait pemanfaatan ruang laut dan wawancara dengan pihak perusahaan BUP PT. Samudera Siak sekaligus melakukan kegiatan pemetaan dan pengambilan titik koordinat untuk pengukuran luasan wilayah



Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kapal Perikanan Ditemukan 4 Kapal Perikanan Tidak Memiliki Dokumen (Diberikan Sanksi Administrative Berupa Surat Peringatan Tertulis I)



Rute Patroli Pengawasan Perikanan: Perairan Sinaboi, Penapihan, Dumai, Pulau Rupat Utara dan sekitarnya (Wil. III)



Patroli Pengawasan Perikanan (Wil. III)

BAB III

PROGRAM KERJA DAN CAPAIAN



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI RIAU

3.1 Indikator Kinerja Utama Target IKU dan Program

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran/gambaran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Rencana Strategis satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 21
Indikator Kineja Utama (IKU) dan Program

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN			TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Badan Pusat Statistik			113	104,44	92,42				BPS
			NTN	=	Total Penerimaan Nelayan					100		
					Total Pengeluaran Nelayan							
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Badan Pusat Statistik			113	100,35	88,80				BPS
			NTPI	=	It Ib					100 %		
					Dengan Penjelasan Sebagai Berikut :							
			It	=	Indek harga yang diterima pembudidaya							
			Ib	=	Indek harga yang dibayar pembudidaya							
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton) (Hasil Produksi)				288.589,39	245.661,63	85,12				
		- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Σ Hasil Produksi Budidaya Pembesaran			131.389,52	122.214,09	93,02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Bidang Perikanan Budidaya
									Kegiatan :			
									Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dar/atau Tenaga Kerja Asing			
									Sub Kegiatan :			
									1. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	99.490.000	50.783.250	
									Kegiatan :			
									Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
									Sub Kegiatan :			
									1. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	56.795.000	36.767.800	
									Kegiatan :			
									Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			
									Sub Kegiatan :			
									1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.563.130.000	120.855.500	
									2. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	101.663.000	50.068.608	
									3. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	96.705.000	82.072.020	
									Kegiatan :			
									Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan			
									Sub Kegiatan :			
									1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.256.350.000	509.596.921	
									2. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.381.836.721	1.859.704.358	

		- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Σ Hasil Produksi Tangkapan Laut + PUD + Pelabuhan	157.199,87	123.447,55	78,53	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Bidang Perikanan Tangkap
							Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			
							Sub Kegiatan :			
							1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	85.918.294	75.960.280	
							2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5.679.351.750	3.537.965.612	
							Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi			
							Sub Kegiatan :			
							1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	4.194.551.600	4.120.506.274	
							Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk			
							Sub Kegiatan :			
							1. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	95.991.069	86.708.569	
							Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			
							Sub Kegiatan :			
							1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	16.714.227.000	15.420.418.809	
		- Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	Σ Hasil Produksi Pengolahan UPI	19.738,45	15.509,68	78,58	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Bidang P2HKP
							Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
							Sub Kegiatan :			
							1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	63.268.000	27.195.000	
							Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
							Sub Kegiatan :			
							1. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	259.357.000	104.640.720	
							Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
							Sub Kegiatan :			
							1. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	150.312.008	149.293.739	

3	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (%)	X	<div><div>=</div><div><div>Ci</div><div><div><div><div>100</div></div></div><div>Si</div><div>N</div></div></div></div>	90	59,05	65,61	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 2. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 3. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 4. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 2. Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	42.500.000 54.220.000 4.920.000 500.000.000	11.463.750 27.471.250 3.367.500 469.930.000	Bidang Kelautan dan Pengawasan, UPT.PSDKP Wilayah 1, 2 dan 3	
				Dengan Penjelasan Sebagai Berikut : Ci= Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh Si= Jumlah Sampel Pelaku Usaha yang Diperiksa N= Jumlah Komponen Pelaku Usaha								
4	Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	PSDKP	<div><div>=</div><div><div>Jumlah SDK Yang Dimanfaatkan (Ha)</div><div><div><div><div>100 %</div></div></div><div>Jumlah Total Wilayah Kelola Laut (Ha)</div></div></div></div> <div>Dengan Penjelasan Sebagai Berikut : SDK = Sumber Daya Kelautan</div>	22	11,66	53,00	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 2. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan : Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Sub Kegiatan : 1. Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	688.287.933 249.999.877 74.999.820	620.196.650 230.444.000 40.764.500	Bidang Kelautan dan Pengawasan	

Berdasarkan hasil Indikator Capaian kinerja (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan beberapa hal:

1. Bidang Perikanan Tangkap,

- Permasalahan

Penurunan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dampak dari tiga faktor utama;

- a. Pemutakhiran data yang menghasilkan angka riil jumlah RTP dan armada
- b. Berkurangnya aktivitas penangkapan yang tercermin dari penurunan trip melaut
- c. Dominasi nelayan sambilan yang berimplikasi pada rendahnya intensitas penangkapan

- Hambatan

Sektor perikanan tangkap di wilayah ini menghadapi beberapa hambatan signifikan yang mempengaruhi produktivitas dan pengembangan sektor secara keseluruhan.

- a. Sarana penangkapan ikan yang tersedia saat ini belum memadai untuk mendukung aktivitas penangkapan yang optimal. Kondisi ini diperburuk dengan pola penangkapan yang masih terbatas pada sistem one day trip, dimana nelayan hanya mampu melakukan operasi penangkapan dalam rentang waktu satu hari. Pola operasi seperti ini secara langsung membatasi jangkauan area penangkapan dan berimplikasi pada volume hasil tangkapan yang dapat diperoleh.
- b. Tantangan lain yang dihadapi adalah karakteristik armada penangkapan yang masih didominasi oleh kapal-kapal berskala kecil. Dominasi armada skala kecil ini membatasi kemampuan nelayan untuk menjangkau fishing ground yang lebih jauh dan membatasi kapasitas angkut hasil tangkapan. Keterbatasan ini menjadi faktor pembatas dalam upaya peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap.
- c. Selain itu, terdapat kendala dalam aspek pendataan yang belum berjalan optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah SDM pendata yang tersedia dengan luasnya wilayah yang harus dicakup. Kondisi ini mengakibatkan proses pengumpulan data menjadi kurang komprehensif dan mempengaruhi akurasi data yang dihasilkan. Keterbatasan ini pada akhirnya berdampak pada kualitas perencanaan dan evaluasi program pengembangan sektor perikanan tangkap di wilayah tersebut.

- Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi sektor perikanan tangkap, beberapa langkah tindak lanjut strategis akan dilaksanakan.

- a. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan sarana penangkapan ikan kepada nelayan sebagai upaya peningkatan kapasitas operasional. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung nelayan dalam mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan dan meningkatkan produktivitas mereka.
- b. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, akan dilaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang terstruktur kepada nelayan dan kelompok nelayan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam mengoperasikan sarana penangkapan ikan secara optimal serta memberikan pemahaman tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan.
- c. Guna memperkuat sistem pendataan hasil produksi perikanan tangkap, akan dilakukan koordinasi intensif dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Koordinasi ini difokuskan pada pelibatan penyuluh perikanan dalam proses pendataan. Dengan melibatkan penyuluh perikanan yang tersebar di berbagai wilayah, diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan cakupan pendataan hasil produksi perikanan tangkap. Pendekatan ini juga akan membantu mengatasi keterbatasan SDM pendata yang selama ini menjadi kendala dalam proses pengumpulan data.

2. Bidang Perikanan Budiaya

- Permasalahan

- a. Sektor perikanan saat ini menghadapi tantangan serius terkait tingginya biaya produksi yang terutama disebabkan oleh mahalnya harga pakan ikan. Pakan merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya produksi, mencapai 70-80% dari total biaya operasional. Kondisi ini menciptakan beban yang signifikan bagi pelaku usaha perikanan.

- Hambatan

- a. Sektor budidaya ikan masih menghadapi kendala fundamental berupa lemahnya permodalan di tingkat pelaku usaha. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi pembudidaya ikan dalam mengembangkan dan mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. Keterbatasan modal tidak hanya mempengaruhi skala produksi, tetapi juga berdampak pada

kemampuan pembudidaya untuk mengadopsi teknologi dan praktik budidaya yang lebih efisien. Lemahnya permodalan juga membatasi kemampuan pembudidaya untuk melakukan investasi dalam infrastruktur budidaya, pengadaan input produksi berkualitas, dan penerapan teknologi modern. Hal ini menciptakan siklus yang kurang menguntungkan, dimana keterbatasan modal menyebabkan produktivitas yang tidak optimal, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan dan kemampuan akumulasi modal usaha.

- Rencana Tindak Lanjut
 - a. Dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor Perikanan Budidaya, telah dilaksanakan program pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya kepada para pembudidaya ikan. Bantuan ini mencakup pemberian peralatan budidaya seperti; Alat Penangkapan Ikan, , Mesin Kapal Penangkapan Ikan, Kapal Fiber serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan untuk mengoptimalkan hasil budidaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hasil budidaya, sekaligus mengurangi beban biaya operasional para pembudidaya.
 - b. Sejalan dengan program tersebut, dilakukan penggerakan GERPARI (Gerakan Pakan Ikan Mandiri) sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya pakan yang menjadi kendala utama dalam usaha budidaya ikan. Program ini mendorong pembudidaya untuk memproduksi pakan ikan secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia. Melalui GERPARI, para pembudidaya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat pakan ikan berkualitas, serta didampingi dalam proses produksi hingga penggunaan pakan. Kemandirian dalam penyediaan pakan ini diharapkan dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan pembudidaya.
- 3. Bidang Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (P2HKP)
 - Permasalahan
 - a. Berdasarkan evaluasi capaian target Produksi Perikanan dan Pemasaran Hasil Perikanan tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan realisasi produksi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan ini tersebar di beberapa kabupaten/kota dengan karakteristik yang berbeda-beda.

- b. Di Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan cuaca yang berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku. Kondisi ini mempengaruhi kontinuitas produksi dan mengakibatkan penurunan kapasitas produksi secara keseluruhan.
 - c. Sementara itu, Kabupaten Siak menghadapi permasalahan dari sisi permintaan pasar. Terjadi pergeseran preferensi konsumen yang lebih memilih mengonsumsi ikan segar dibandingkan produk olahan. Perubahan pola konsumsi ini berdampak pada penurunan permintaan terhadap produk olahan perikanan di wilayah tersebut.
 - d. Permasalahan yang berbeda ditemui di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi, di mana beberapa Unit Pengolahan Ikan (UPI) mengalami kendala keberlanjutan usaha. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pelaku usaha yang sudah berusia lanjut tanpa ada regenerasi dari anggota keluarga, beberapa pelaku usaha yang telah meninggal dunia, serta adanya pelaku usaha yang beralih ke profesi lain. Situasi ini mengakibatkan berkurangnya jumlah UPI yang aktif berproduksi di kedua wilayah tersebut.
 - e. Faktor terakhir yang mempengaruhi pencapaian target adalah adanya perubahan metodologi pencatatan di Kabupaten Kampar. Pada tahun 2023, seluruh produk ikan segar dimasukkan ke dalam kategori produk olahan segar. Namun, pada tahun 2024 terjadi perubahan sistem pencatatan di mana hanya ikan segar yang telah mengalami perlakuan yang dikategorikan sebagai produk olahan segar. Perubahan metode pencatatan ini mengakibatkan perbedaan signifikan pada data statistik produksi antara tahun 2023 dan 2024.
 - f. Kombinasi dari berbagai permasalahan tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pencapaian target produksi perikanan dan pemasaran hasil perikanan di tahun 2024. Situasi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan strategi yang terencana untuk dapat mengatasi berbagai kendala yang ada serta meningkatkan capaian produksi di masa mendatang.
- Hambatan
- Dalam upaya pengembangan sektor perikanan, terdapat beberapa hambatan signifikan yang mempengaruhi optimalisasi produksi dan pemasaran hasil perikanan. Hambatan-hambatan ini mencakup berbagai aspek mulai dari proses produksi hingga pemasaran.
- a. Karakteristik produksi olahan perikanan yang masih didominasi oleh

metode tradisional. Hal ini mencerminkan belum terjadinya modernisasi yang memadai dalam proses pengolahan, yang dapat mempengaruhi efisiensi produksi, konsistensi kualitas, dan kapasitas pengolahan secara keseluruhan.

- b. Dari sisi pemasaran, manajemen pemasaran hasil produk olahan masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan pasar lokal. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penetrasi pasar yang lebih luas, sehingga membatasi potensi pengembangan usaha dan nilai ekonomi yang dapat dicapai.
- c. Belum tersedianya Koperasi yang berfungsi sebagai penampung hasil produk olahan ikan menjadi hambatan tersendiri. Ketidadaan lembaga ini mengakibatkan kurangnya dukungan dalam hal pengumpulan, distribusi, dan pemasaran produk secara terorganisir.
- d. Stabilitas dan kapasitas pemenuhan bahan baku bagi usaha pengolahan ikan belum berjalan optimal. Permasalahan ini berdampak pada keberlanjutan proses produksi dan kemampuan unit pengolahan untuk memenuhi permintaan pasar secara konsisten.
- e. masih terdapat kendala dalam pemahaman Unit Pengolahan Ikan (UPI) terhadap kewajiban pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas produk akhir dan daya saing produk di pasar yang lebih luas.
- f. pengembangan ragam produk dan inovasi produk bernilai tambah belum mencapai tingkat optimal dan belum memperoleh popularitas yang diharapkan. Kondisi ini mengindikasikan masih terbatasnya diversifikasi produk dan inovasi yang dapat meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.

Berbagai hambatan tersebut saling terkait dan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dalam penanganannya. Diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi setiap aspek hambatan guna mendorong pengembangan sektor pengolahan perikanan yang lebih maju dan berdaya saing.

- Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari rencana kerja yang telah ditetapkan, berikut dijabarkan langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan untuk setiap program yang telah direncanakan.

- a. Untuk pengembangan promosi melalui pameran, akan dilakukan pemetaan event-event strategis baik di tingkat lokal, nasional, maupun

regional. Pelaksanaannya akan diawali dengan seleksi produk unggulan dari masing-masing UPI, penyiapan materi promosi yang menarik, serta pemberian pelatihan teknik display dan komunikasi pemasaran kepada para pelaku usaha yang akan berpartisipasi dalam pameran.

- b. Dalam aspek pembinaan mutu hasil produk olahan, akan dilaksanakan serangkaian pelatihan dan pendampingan teknis kepada SDM UPI. Khusus untuk pengembangan pasar ke provinsi lain dan negara tetangga, akan diberikan pemahaman mendalam tentang persyaratan ekspor dan standar keamanan pangan internasional.
- c. Untuk penguatan koordinasi dengan dinas terkait, akan dibentuk tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tim ini akan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan program, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan solusi bersama. Koordinasi ini juga akan mencakup aspek perizinan, standarisasi, dan pengembangan infrastruktur pendukung.
- d. Dalam hal diversifikasi pengolahan hasil perikanan, akan dilakukan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru. Program ini akan didukung dengan pelatihan inovasi produk, pendampingan dalam pengembangan resep dan formula produk baru, serta bantuan teknis dalam hal pengemasan dan pelabelan yang menarik.

Seluruh rencana tindak lanjut ini akan dilaksanakan dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, pemerintah, dan mitra pendukung lainnya, akan menjadi kunci keberhasilan implementasi program-program tersebut.

4. Bidang Kelautan dan Pengawasan

- Permasalahan Pencapaian indikator Luas Kawasan Kelautan, Pesisir, dan Pulau pulau kecil yang di kelola (Ha) yang melebihi target hingga mencapai 103% menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam penetapan target dan mekanisme perhitungan, yaitu:
 - a. Dalam upaya pengelolaan wilayah laut di Provinsi Riau, terdapat kendala signifikan dalam perhitungan persentase wilayah kelola laut. Saat ini, perhitungan yang dilakukan masih terbatas pada kawasan konservasi saja, belum mencakup keseluruhan wilayah kelola laut sebagaimana seharusnya.

Keterbatasan ini terjadi karena belum finalnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Kondisi tersebut mengakibatkan belum adanya landasan hukum yang kuat untuk melakukan perhitungan komprehensif terhadap seluruh wilayah kelola laut di Provinsi Riau.

- Hambatan

Hambatan utama dalam perhitungan capaian Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah belum dapat dilaksanakannya proses konversi perizinan. Hal ini disebabkan perizinan yang dikeluarkan oleh Pusat belum dapat dikonversi ke dalam sistem perhitungan persentase capaian. Kondisi ini berdampak pada:

1. Kesulitan dalam mengintegrasikan data perizinan pusat ke dalam sistem perhitungan local
2. Tidak akuratnya perhitungan persentase capaian pengelolaan sumberdaya
3. Terhambatnya proses evaluasi kinerja pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

- Rencana Tindak Lanjut

a. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan capaian indikator pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan akan dilakukan melalui koordinasi formal dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Langkah ini akan dilaksanakan dengan mengirimkan surat resmi yang memuat permintaan data rinci mengenai jumlah dan luasan perizinan yang telah dikeluarkan oleh KKP

- Permasalahan

Pencapaian indikator persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang melebihi target hingga mencapai 103% menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam penetapan target dan mekanisme perhitungan, diantaranya Penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri menghadapi beberapa permasalahan mendasar yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pencapaian tujuan konservasi, Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan pendekatan komprehensif dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan

- Hambatan

Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya keterlambatan dalam proses evaluasi teknis untuk kawasan konservasi yang telah dicadangkan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terdapat kawasan yang sudah dicadangkan sebagai kawasan konservasi
- b. Proses evaluasi teknis yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan belum terlaksana
- c. Status kawasan masih dalam tahap pencadangan dan belum mencapai tahap penetapan final

- Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian indikator pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, akan dilaksanakan koordinasi formal dengan Tim Konservasi Ekosistem Biota Perairan KKP RI. Koordinasi ini akan ditindaklanjuti melalui pengiriman surat resmi yang berisi permintaan data terperinci terkait perizinan yang telah diterbitkan oleh KKP, mencakup informasi mengenai jumlah perizinan serta luasan area yang termasuk dalam perizinan tersebut. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Data yang diperoleh akan membantu dalam mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang tepat untuk optimalisasi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.

3.2 APBD

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mencatatkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik di tahun 2024. Dari total Pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp 77.023.161.497, dinas berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp 66.470.397.461,57. Pencapaian ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 86,30%, yang lebih menggembirakan, realisasi fisik kegiatan mencapai 97,24%, ini menunjukkan bahwa hampir seluruh program kerja yang direncanakan telah berhasil dilaksanakan. Untuk tahun anggaran 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mendapatkan alokasi pagu murni sebesar Rp 75.063.762.957.

Jika dibandingkan dengan pagu tahun 2024, terdapat penurunan alokasi anggaran sekitar Rp 1,96 miliar pada pagu murni tahun 2025, hal ini menunjukkan bahwa dinas memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola dan mengeksekusi program-program yang direncanakan.

Tabel 22
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya T.A. 2024 dan 2025

Kode Rekening			Uraian	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025 (Rp)
				Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
4			PENDAPATAN DAERAH				
4	1		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	3.755.500.000	1.381.900.000	1.721.968.600	1.545.350.000
4	1	02	Retribusi Daerah	3.755.500.000	1.381.900.000	1.721.968.600	1.545.350.000
			Jumlah Pendapatan	3.755.500.000	1.381.900.000	1.721.968.600	1.545.350.000
5			BELANJA DAERAH				
5	1		BELANJA OPERASI	56.509.580.824	56.220.547.673	47.598.021.202	44.089.569.755
5	1	01	Belanja Pegawai	24.334.148.429	27.541.384.763	26.202.632.581	24.112.804.879
5	1	02	Belanja Barang danJasa	32.175.432.395	28.679.162.910	21.395.388.621	19.976.764.876
5	2		BELANJA MODAL	19.337.632.816	20.802.613.824	18.872.376.259,57	30.974.193.202
5	2	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.484.925.587	1.425.941.745	1.193.861.273	919.259.656
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.403.847.729	7.929.052.579	7.267.742.106,03	2.004.241.500
5	2	03	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.448.859.500	11.447.619.500	10.410.772.880,54	28.050.692.046
			Jumlah Belanja	75.847.213.640	77.023.161.497	66.470.397.461,57	75.063.762.957

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024 memiliki Pagu dan Realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 23
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya T.A. 2024 dan 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KET.
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		REALISASI				
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024	APBD-P 2024	TARGET	APBD-P 2024	Keuangan (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				75.847.213.640	77.023.161.497		66.470.397.461,57			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				75.847.213.640	77.023.161.497		66.470.397.461,57		97,24	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				75.847.213.640	77.023.161.497		66.470.397.461,57	86,30	97,24	
A.		SEKRETRIAT				32.294.739.673	36.178.431.084		33.931.526.306,03	93,79	99,39	
1	36.975	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kelautan dan perikanan	-	100 Persen	32.294.739.673	36.178.431.084	100 Persen	33.931.526.306,03	93,79		
	3.25.01.1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	-	5 Laporan	24.334.148.429	27.541.384.763	5 Laporan	26.202.632.581,00	95,14		

	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/Bulan	143 Orang/Bulan	24.334.148.429	27.541.384.763	143 Orang/Bulan	26.202.632.581,00	95,14	100,00	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola	-	7 Laporan	352.235.598	352.235.598	7 Laporan	297.466.500,00	84,45		
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	7 Laporan	352.235.598	352.235.598	7 Laporan	297.466.500,00	84,45	84,45	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	-	6 Jenis	1.273.072.101	1.495.066.189	6 Jenis	1.389.230.680,00	92,92		
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 Paket	62 Paket	196.361.318	196.361.318	62 Paket	194.478.200,00	99,04	99,04	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10428.00 Paket	10428.00 Paket	235.002.000	235.002.000	10428.00 Paket	200.362.000,00	85,26	85,26	Self blocking anggaran
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	103.300.783	103.300.783	15 Paket	103.300.783,00	100,00	100,00	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00 Laporan	1.00 Laporan	738.408.000	960.402.088	1.00 Laporan	891.089.697,00	92,78	92,78	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-	2 Jenis	199.839.915	139.817.006	2 Jenis	0,00	-		

	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	199.839.915	139.817.006	0 Unit	0,00	-	86,92	Tunda bayar di Tahun 2025
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-	2 Jenis	3.147.549.151	2.822.454.780	2 Jenis	2.778.578.627,00	98,45		
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	1.769.992.995	1.672.992.995	4.00 Laporan	1.668.170.971,00	99,71	100,00	
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41 Laporan	41 Laporan	1.377.556.156	1.149.461.785	41 Laporan	1.110.407.656,00	96,60	100,00	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-	27 Jenis	2.987.894.479	3.827.472.748	27 Jenis	3.263.617.918,03	85,27		
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27.00 Unit	27.00 Unit	200.000.000	349.373.419	27.00 Unit	347.226.206,00	99,39	100,00	self blocking anggaran
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	278.00 Unit	278.00 Unit	133.000.000	133.000.000	278.00 Unit	133.000.000,00	100,00	100,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	2.654.894.479	3.345.099.329	1.00 Unit	2.783.391.712,03	83,21	98,73	self blocking anggaran

B.		BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN				1.664.999.565	1.614.927.630		1.403.637.650,00	86,92	97,88	
2	37.340	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	- Luas Kawasan Kelaut Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang di Kelola	-	141.507.85 Hektar	1.024.999.630	1.013.287.630	141.507.85 Hektar	891.405.150,00	87,97		
	3.25.02.1. 01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)	-	205601 Ha	949.999.810	938.287.810	205601 Ha	850.640.650,00	90,66		
	3.25.02.1. 01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	144633.74 Ha	144633.74 Ha	699.999.933	688.287.933	144633.74 Ha	620.196.650,00	90,11	100,00	
	3.25.02.1. 01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha	2 Ha	249.999.877	249.999.877	2 Ha	230.444.000,00	92,18	100,00	
	3.25.02.1. 02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Izin yang Diterbitkan	-	9 Izin	74.999.820	74.999.820	9 Izin	40.764.500,00	54,35		
	3.25.02.1. 02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	9 Rekomen dasi	9 Rekomen dasi	74.999.820	74.999.820	9 Rekomen dasi	40.764.500,00	54,35	90,00	

3	38.436	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pelanggaran yang ditangani	-	16 Persen	639.999.935	601.640.000	16 Persen	512.232.500,00	85,14		
	3.25.05.1. 01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mil yang diawasi	-	273 Pelaku Usaha	500.000.000	500.000.000	273 Pelaku Usaha	469.930.000,00	93,99		
	3.25.05.1. 01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	2 Kelompok	500.000.000	500.000.000	2 Kelompok	469.930.000,00	93,99	100,00	barang sudah diserahkan, proses pencairan dikeuangan
	3.25.05.1. 02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	-	90 Dokumen	139.999.935	101.640.000	90 Dokumen	42.302.500,00	41,62		
	3.25.05.1. 02.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	50.000.000	42.500.000	20.00 Dokumen	11.463.750,00	26,97	50,00	Self bloking anggaran

	3.25.05.1. 02.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	30 Dokumen	30 Dokumen	60.000.000	54.220.000	30 Dokumen	27.471.250,00	50,67	90,00	Self bloking anggaran
	3.25.05.1. 02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Dokumen	20 Dokumen	29.999.935	4.920.000	20 Dokumen	3.367.500,00	68,45	100,00	rasionalisasi APBD-P
C.		BIDANG PERIKANAN TANGKAP				12.637.212.713	10.055.812.713		7.821.140.735,00	77,78	100,00	
4	37.705	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	-	157.199,87 Ton	12.637.212.713	10.055.812.713	157.199,87 Ton	7.821.140.735,00	77,78		
	3.25.03.1. 01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan	-	3 Wilayah	8.266.670.044	5.765.270.044	3 Wilayah	3.613.925.892,00	62,68		
	3.25.03.1. 01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	85.918.294	85.918.294	1.00 Dokumen	75.960.280,00	88,41	100,00	

	3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1545.00 Unit	1545.00 Unit	8.180.751.750	5.679.351.750	1545.00 Unit	3.537.965.612,00	62,30	100,00	Adanya penambahan anggaran melalui pokok pikiran anggota dewan DPRD Provinsi Riau dan peralihan dari bantuan kapal ke alat tangkap sehingga unit bantuan alat tangkap menjadi tinggi
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan	-	4 Wilayah	4.274.551.600	4.194.551.600	4 Wilayah	4.120.506.274,00	98,23		
	3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	40.00 Unit	40.00 Unit	4.274.551.600	4.194.551.600	40.00 Unit	4.120.506.274,00	98,23	100,00	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah perizinan berusaha perikanan tangkap yang diterbitkan untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	170 Izin	95.991.069	95.991.069	170 Izin	86.708.569,00	90,33		

	3.25.03.1. 03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	170.00 Rekomendasi	170.00 Rekomendasi	95.991.069	95.991.069	170.00 Rekomendasi	86.708.569,00	90,33	100,00	1. Adanya pertemuan sosialisasi perizinan perikanan tangkap serta pembinaan dan pendampingan lapangan kepada nelayan/pelaku usaha memberi dampak positif terhadap penerbitan perizinan perikanan tangkap 2. Pelaksanaan patroli pengawasan perikanan di laut memberi dampak terhadap peningkatan penerbitan perizinan 3, Meningkatnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha akan arti penting perizinan perikanan tangkap dalam operasional penangkapan ikan serta manfaat lainnya.
--	-----------------------	---	---	-----------------------	-----------------------	------------	------------	-----------------------	---------------	-------	--------	--

D.		BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA				2.722.483.000	1.917.783.000		340.547.178,00	17,76	27,28	
5	38.071	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	-	131.389,52 Ton	2.722.483.000	1.917.783.000	131.389,52 Ton	340.547.178,00	17,76		
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah perizinan berusaha perikanan budidaya di Laut sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-	10 Izin	99.490.000	99.490.000	10 Izin	50.783.250,00	51,04		
	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	99.490.000	99.490.000	10 Rekomendasi	50.783.250,00	51,04	89,72	1. Anggaran mencakup kegiatan dalam menunjang pencapaian pengeluaran rekomendasi 2. minat atau jumlah pembudidayaan ikan dalam hal utk memperoleh sertifikasi CBIB sangat tinggi guna memperoleh produksi yg tinggi dan bu jaminan keamanan pangan serta lingkungan terjaga. sehingga unit usaha

												mengapresiasi rekomendasi guna tindak lanjut utk memperoleh sertifikat CBIB. 3. Peran aktif SDM di DKP guna melakukan pencapaian realisasi target
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah	-	100 Rekomendasi	56.795.000	56.795.000	100 Rekomendasi	36.767.800,00	64,74		
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	80 Rekomendasi	80 Rekomendasi	56.795.000	56.795.000	80 Rekomendasi	36.767.800,00	64,74	97,15	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan	-	3 Kawasan	2.566.198.000	1.761.498.000	3 Kawasan	252.996.128,00	14,36		

	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	17 Unit	17 Unit	2.364.330.000	1.563.130.000	17 Unit	120.855.500,00	7,73	11,82	Sisa Lelang dan adanya kesepakatan Self Blocking DKP Provinsi Riau
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	101.663.000	101.663.000	1 Dokumen	50.068.608,00	49,25	97,14	
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	90 Orang	90 Orang	100.205.000	96.705.000	90 Orang	82.072.020,00	84,87	98,50	
E.		BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUATAN PERIKANAN (P2HKP)				347.235.000	322.625.000		131.835.720,00	40,86	58,31	
6	38.801	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil olahan perikanan (Ton)	-	19.738,45 Ton	347.235.000	322.625.000	19.738,45 Ton	131.835.720,00	40,86		

	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan	-	4 Unit Usaha	79.978.000	63.268.000	4 Unit Usaha	27.195.000,00	42,98		
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3.00 Unit Usaha	3.00 Unit Usaha	79.978.000	63.268.000	3.00 Unit Usaha	27.195.000,00	42,98	63,68	
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Hasil Perikanan Yang Tersedia	-	1 Dokumen	267.257.000	259.357.000	1 Dokumen	104.640.720,00	40,35		
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	267.257.000	259.357.000	1.00 Dokumen	104.640.720,00	40,35	57,00	Berdasarkan Surat Nomor : B.4211/DJPDS PKP/PDS.330/I X/2024. Perihal : Pelaksanaan Hari Ikan Nasional dan Lomba Masak Serba Ikan Tahun 2024. Bahwasanya

												Kegiatan LMSI tidak dapat dilaksanakan dan di ganti dengan kegiatan Makan Bergizi Gratis Menu Ikan
F.		UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I				775.098.614	649.209.995		394.546.497,00	60,77	83,10	
7	36.975	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kelautan dan perikanan	-	100 Persen	378.342.814	309.725.355	100 Persen	303.406.497,00	97,96		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	-	6 Jenis	145.555.954	80.538.495	6 Jenis	78.609.377,00	97,60		
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	73.033.954	8.016.495	9 Paket	7.662.500,00	95,58	100,00	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.032.000	10.032.000	1 Paket	10.030.000,00	99,98	100,00	

	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	2.770.000	2.770.000	11 Paket	2.770.000,00	100,00	100,00	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	59.720.000	59.720.000	1 Laporan	58.146.877,00	97,37	100,00	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-	2 Jenis	207.514.560	203.914.560	2 Jenis	203.895.120,00	99,99		
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Laporan	6 Laporan	207.514.560	203.914.560	6 Laporan	203.895.120,00	99,99	100,00	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-	27 Jenis	25.272.300	25.272.300	27 Jenis	20.902.000,00	82,71		
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	15.332.300	15.332.300	3 Unit	13.932.000,00	90,87	100,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit	9.940.000	9.940.000	18 Unit	6.970.000,00	70,12	100,00	

8	38.436	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pelanggaran yang ditangani	-	16 Persen	396.755.800	339.484.640	16 Persen	91.140.000,00	26,85		
	3.25.05.1. 01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mil yang diawasi	-	273 Pelaku Usaha	396.755.800	339.484.640	273 Pelaku Usaha	91.140.000,00	26,85		
	3.25.05.1. 01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	60 Dokumen	60 Dokumen	379.995.800	322.724.640	60 Dokumen	89.670.000,00	27,79	68,60	rasionalisasi dan self blocking anggaran
	3.25.05.1. 01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	9 Dokumen	9 Dokumen	16.760.000	16.760.000	9 Dokumen	1.470.000,00	8,77	50,00	self blocking anggaran
G.		UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II				1.061.304.620	957.287.620		902.228.620,00	94,25	95,75	
9	36.975	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kelautan dan perikanan	-	100 Persen	322.013.620	321.433.620	100 Persen	308.784.620,00	96,06		
	3.25.01.1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	-	6 Jenis	93.198.948	93.198.948	6 Jenis	80.549.948,00	86,43		

	3.25.01.1. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	56.093.902	56.093.902	9 Paket	56.093.902,00	100,00	100,00	
	3.25.01.1. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	288 Paket	288 Paket	6.624.000	6.624.000	288 Paket	6.624.000,00	100,00	100,00	
	3.25.01.1. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.087.046	4.087.046	3 Paket	4.087.046,00	100,00	100,00	
	3.25.01.1. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	26.394.000	26.394.000	12 Laporan	13.745.000,00	52,08	100,00	
	3.25.01.1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-	2 Jenis	195.920.480	195.920.480	2 Jenis	195.920.480,00	100,00		
	3.25.01.1. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	195.920.480	195.920.480	4 Laporan	195.920.480,00	100,00	100,00	
	3.25.01.1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-	27 Jenis	32.894.192	32.314.192	27 Jenis	32.314.192,00	100,00		
	3.25.01.1. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2.00 Unit	2.00 Unit	17.894.192	17.894.192	2.00 Unit	17.894.192,00	100,00	100,00	

	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	15.000.000	14.420.000	13 Unit	14.420.000,00	100,00	100,00	
10	38.436	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pelanggaran yang ditangani	-	16 Persen	739.291.000	635.854.000	16 Persen	593.444.000,00	93,33		
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mil yang diawasi	-	273 Pelaku Usaha	739.291.000	635.854.000	273 Pelaku Usaha	593.444.000,00	93,33		
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	706.305.000	602.868.000	5.00 Dokumen	571.110.000,00	94,73	95,00	pemeriksaan patroli 12 mil laut dan pemeriksaan kapal perikanan dalam penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) selama Triwulan IV Tahun 2024 diperoleh pemeriksaan dokumen sebanyak 61 dokumen

	3.25.05.1. 01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	4 Dokumen	4 Dokumen	32.986.000	32.986.000	4 Dokumen	22.334.000,00	67,71	68,01	Upt PSDKP Wilayah II selama rentang tahun 2024 melaksanakan kegiatan pengawasan bagi para pelaku usaha budidaya terkait izin KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut). Dikarenakan izin ini wajib dimiliki oleh usaha budidaya perikanan di laut, sehingga UPT mendorong lebih banyak pelaku usaha yang diawasi karena sudah menjadi atensi Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Adapun izin KKPRL ini menghasilkan PNBP bagi pusat sehingga KKP mendorong agar seluruh pelaku usaha sektor budidaya perikanan di laut wajib memiliki
--	-----------------------	--	--	-----------	-----------	------------	------------	-----------	---------------	-------	-------	--

												dokumen tersebut. Upt PSDKP Wilayah bersinergi dengan Penyuluh Perikanan KKP bekerjasama memeriksa Kesesuaian dokumen izin usaha budidaya perikanan khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga dapat melebihi target awal menjadi 9 dokumen.
H.		UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III				1.043.840.652	989.984.652		806.563.288,00	81,47	89,41	
11	36.975	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kelautan dan perikanan	-	100 Persen	351.444.652	351.444.652	100 Persen	333.237.788,00	94,82		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	-	6 Jenis	57.458.224	57.458.224	6 Jenis	56.776.620,00	98,81		

	3.25.01.1. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	5.00 Paket	16.705.465	16.705.465	5.00 Paket	16.691.020,00	99,91	100,00	
	3.25.01.1. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.00 Paket	4.00 Paket	6.180.000	6.180.000	4.00 Paket	6.180.000,00	100,00	100,00	
	3.25.01.1. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4.00 Paket	4.00 Paket	1.622.759	1.622.759	4.00 Paket	1.615.600,00	99,56	100,00	
	3.25.01.1. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.00 Laporan	8.00 Laporan	32.950.000	32.950.000	8.00 Laporan	32.290.000,00	98,00	100,00	
	3.25.01.1. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-	2 Jenis	38.249.120	38.249.120	2 Jenis	20.853.000,00	54,52		
	3.25.01.1. 07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.00 Unit	7.00 Unit	38.249.120	38.249.120	7.00 Unit	20.853.000,00	54,52	54,52	
	3.25.01.1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-	2 Jenis	230.486.708	230.486.708	2 Jenis	230.406.468,00	99,97		
	3.25.01.1. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	230.486.708	230.486.708	7 Laporan	230.406.468,00	99,97	100,00	

	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-	27 Jenis	25.250.600	25.250.600	27 Jenis	25.201.700,00	99,81		
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2.00 Unit	2.00 Unit	21.310.600	21.310.600	2.00 Unit	21.261.700,00	99,77	100,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00 Unit	4.00 Unit	3.940.000	3.940.000	4.00 Unit	3.940.000,00	100,00	100,00	
12	38.436	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pelanggaran yang ditangani	-	16 Persen	692.396.000	638.540.000	16 Persen	473.325.500,00	74,13		
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mil yang diawasi	-	273 Pelaku Usaha	692.396.000	638.540.000	273 Pelaku Usaha	473.325.500,00	74,13		
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	75.00 Dokumen	75.00 Dokumen	653.786.000	599.930.000	75.00 Dokumen	471.005.500,00	78,51	90,00	
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai	30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	38.610.000	38.610.000	30.00 Dokumen	2.320.000,00	6,01	28,80	Self bloking anggaran

			dengan 12 Mil									
I		UPT. BUDIDAYA PERIKANAN				6.306.043.001	6.306.043.001		4.006.434.085,00	63,53	98,65	
13	36.975	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kelautan dan perikanan	-	100 Persen	1.667.856.280	1.687.054.142	100 Persen	1.637.132.806,00	97,04		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	-	6 Jenis	218.627.800	257.780.712	6 Jenis	222.328.622,00	86,25		
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	45.627.800	84.180.712	8 Paket	50.223.672,00	59,66	100,00	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	12.000.000	12.000.000	3 Paket	11.994.000,00	99,95	100,00	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.000.000	9.600.000	4 Paket	9.549.000,00	99,47	100,00	

	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	152.000.000	152.000.000	1 Laporan	150.561.950,00	99,05	100,00	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-	2 Jenis	982.308.480	973.308.480	2 Jenis	966.269.832,00	99,28		
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	25 Laporan	982.308.480	973.308.480	25 Laporan	966.269.832,00	99,28	100,00	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-	27 Jenis	466.920.000	455.964.950	27 Jenis	448.534.352,00	98,37		
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	134.435.050	123.480.000	2 Unit	123.456.100,00	99,98	100,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	332.484.950	332.484.950	1 Unit	325.078.252,00	97,77	100,00	
14	38.071	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	-	131.389,52 Ton	4.638.186.721	4.618.988.859	131.389,52 Ton	2.369.301.279,00	51,29		

	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan	-	-	4.638.186.721	4.618.988.859	-	2.369.301.279,00	51,29		
	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perbenihan dan Pembudidayaan Air Payau	-	2 Unit	2.256.350.000	2.256.350.000	2 Unit	509.596.921,00	22,59	99,48	Tunda bayar di Tahun 2025
	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Perbenihan dan Pembudidayaan Air Tawar, Payau dan Laut	10 Unit	10 Unit	2.381.836.721	2.362.638.859	10 Unit	1.859.704.358,00	78,71	96,89	
J		UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN				592.546.998	592.546.998		590.878.222,00	99,72	100,00	
15	36.975	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	100 Persen	440.734.990	442.234.990	100 Persen	441.584.483,00	99,85		

			bidang kelautan dan perikanan									
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana Perbenihan dan Pembudidayaan Air Tawar, Payau dan Laut	-	6 Jenis	36.432.064	54.768.144	6 Jenis	54.494.200,00	99,50		
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	5.00 Paket	9.972.206	9.972.206	5.00 Paket	9.957.200,00	99,85	100,00	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.00 Paket	4.00 Paket	2.139.858	2.139.858	4.00 Paket	2.139.500,00	99,98	100,00	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	24.320.000	42.656.080	1 Laporan	42.397.500,00	99,39	100,00	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-	2 Jenis	290.279.088	264.943.008	2 Jenis	264.943.008,00	100,00		
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10.00 Laporan	10.00 Laporan	290.279.088	264.943.008	10.00 Laporan	264.943.008,00	100,00	100,00	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-	27 Jenis	114.023.838	122.523.838	27 Jenis	122.147.275,00	99,69		

	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3.00 Unit	3.00 Unit	21.023.838	29.523.838	3.00 Unit	29.523.000,00	100,00	100,00	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.00 Unit	9.00 Unit	93.000.000	93.000.000	9.00 Unit	92.624.275,00	99,60	100,00	
16	38.801	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	-	19.738,45 Ton	151.812.008	150.312.008	19.738,45 Ton	149.293.739,00	99,32		
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan	-	4 Unit Usaha	151.812.008	150.312.008	4 Unit Usaha	149.293.739,00	99,32		
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk	7.00 Unit Usaha	7.00 Unit Usaha	151.812.008	150.312.008	7.00 Unit Usaha	149.293.739,00	99,32	100,00	

			Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing									
K		UPT. PELABUHAN PERIKANAN				16.401.709.804	17.438.509.804		16.141.059.160,54	92,56	99,98	
17	36.975	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kelautan dan perikanan	-	100 Persen	636.242.804	724.282.804	100 Persen	720.640.352,00	99,50		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	-	6 Jenis	160.414.864	215.014.864	6 Jenis	211.786.412,00	98,50		
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	106.721.981	106.721.981	9 Paket	105.177.085,00	98,55	98,55	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.771.943	4.771.943	1 Paket	4.760.000,00	99,75	100,00	

	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.868.440	9.868.440	2 Paket	9.867.827,00	99,99	99,99	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00 Laporan	1.00 Laporan	39.052.500	93.652.500	1.00 Laporan	91.981.500,00	98,22	98,22	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-	2 Jenis	435.827.940	435.827.940	2 Jenis	435.827.940,00	100,00		
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.400.000	2.400.000	1 Laporan	2.400.000,00	100,00	100,00	
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	433.427.940	433.427.940	1.00 Laporan	433.427.940,00	100,00	100,00	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-	27 Jenis	40.000.000	73.440.000	27 Jenis	73.026.000,00	99,44		
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2.00 Unit	2.00 Unit	40.000.000	73.440.000	2.00 Unit	73.026.000,00	99,44	100,00	

18	37.705	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	-	157.199,87 Ton	15.765.467.000	16.714.227.000	157.199,87 Ton	15.420.418.808,54	92,26		
	3.25.03.1. 06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola	-	1 Unit	15.765.467.000	16.714.227.000	1 Unit	15.420.418.808,54	92,26		
	3.25.03.1. 06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5.00 Unit	5.00 Unit	15.765.467.000	16.714.227.000	5.00 Unit	15.420.418.808,54	92,26	100,00	
	J U M L A H					75.847.213.640	77.023.161.497		66.470.397.461,57	86,30	97,24	

Tabel 24
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya T.A. 2024 dan 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penetapan Apbd Murni 2025			Sumber Dana
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
					SEKRETARIAT			30.101.235.944		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	30.101.235.944		
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	202.416.000		
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	102.416.000	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	Pekanbaru	APBD
3	25	02	1.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Pekanbaru	APBD

3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan	24.112.804.879		
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang	24.112.804.879	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola	1 Laporan	150.000.000		APBD
3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14 Laporan	70.000.000	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	80.000.000	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	1.772.831.673		
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	90.000.000	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	235.002.000	Pekanbaru	APBD

3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	103.300.873	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	1.094.528.800	Pekanbaru	APBD
3	25	02	1.07	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11 Dokumen	50.000.000	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	2.618.902.972		
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.769.992.995	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan	848.909.977	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	2 Jenis	160.494.125		
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	135.494.125	Pekanbaru	APBD
3	25	02	1.08	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.000.000	Pekanbaru	APBD

3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	27 Jenis	1.083.786.295		
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	355.966.295	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	278 Unit	153.000.000	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	574.820.000	Pekanbaru	APBD
					Bidang KP			1.661.386.297	-	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)	280.624	1.067.626.298		
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)	18.539,1 Ha			
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	144633,73 Ha	1.067.626.298	Provinsi Riau	APBD,D AK
3	25	02	101	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	3 Ha	-	Provinsi Riau	APBD

3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	7 kasus	593.759.999		
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	245 Pelaku Usaha	493.760.000		
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	3 Kelompok Masyarakat	473.760.000	Provinsi Riau	DAK
3	25	05	1.02	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	2 Forum	20.000.000	Provinsi Riau	APBD
3	25	05	102		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	40 Dokumen	99.999.999		
3	25	05	102	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha pelaku Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	39.999.999	Provinsi Riau	APBD
3	25	05	102	0005	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah usaha pelaku Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan mengumpulkan air lainnya yang diriksa memenuhinya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha		Provinsi Riau	APBD

3	25	05	102	0006	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Usaha pelaku pembudidaya ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan mengumpulkan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	60.000.000	Provinsi Riau	APBD
					BIDANG TANGKAP			3.348.789.609	-	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	140.000	3.348.789.609		
3	25	03	101		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan	3 Wilayah	1.681.342.865		
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	174.710.000	Provinsi Riau	APBD
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit	-	Bengkalis	APBD
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1016 Unit	1.506.632.865	Rokan Hilir, Kep.Meranti, Indragiri Hilir, Bengkalis, Dumai,Siak, Pelalawan	APBD

3	25	03	102		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan	4 Wilayah	1.506.759.500		
3	25	03	102	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	216.265.000		APBD
3	25	03	102	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	2015 Unit	1.290.494.500	Pekanbaru, P elalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kampar, Rok an Hulu, Kuant n Singingi	APBD
3	25	03	103		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan	170 Izin	160.687.244		
3	25	03	103	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mi	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 persen	91.462.454	Provinsi Riau	APBD

3	25	03	103	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1 Dokumen	69.224.790	Provinsi Riau	APBD
					BIDANG BUDIDAYA			1.846.246.190		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)	132.712,51	1.846.246.190	Provinsi Riau	
3	25	04	101		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 izin	-		
3	25	04	101	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	-	Kep.Meranti, Rokan Hilir, Bengkalis,Siak, Inhil,Pelalawan dan Kota Dumai	APBD
3	25	04	103		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang di terbitkan yang di terbitkan	3 izin	-		

3	25	04	103	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	-	Kep.Meranti	APBD
3	25	04	104		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah	3 Kawasan	-		
3	25	04	104	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250 Rekomendasi	-	Kep.Meranti, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Inhil, dan Kota Dumai	APBD
3	25	04	105		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan	3 Kawasan	167.674.000		
3	25	04	105	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	Kep.Meranti, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kota Dumai	APBD
3	25	04	105	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	90 Orang	66.011.000	Kep.Meranti dan Bengkalis	APBD
3	25	04	105	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	10 Unit	101.663.000	Kep.Meranti, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Inhil, Pelalawan, Kota Dumai	APBD

3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan	5 Kawasan	1.678.572.190		
3	25	04	106	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	88 Unit	1.074.730.085	Pelalawan,K ampar, indragiri hulu,Rokan Hulu	APBD
3	25	04	106	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	603.842.105	kab.kampar	APBD
					Bidang P2HKP			524.796.621		
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)	29.845,28	524.796.621		APBD
3	25	06	101		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pemasaran dan pemrosesan hasil yang diterbitkan	6 izin	35.250.000		
3	25	06	101	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	6 Dokumen	35.250.000	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru	APBD

3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan	4 Unit	489.546.621		
3	25	06	102	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 kegiatan	453.876.621	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir dan Kab. Siak	APBD
3	25	06	102	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 kegiatan	35.670.000	Kab. Bengkalis dan Kab. Rokan Hilir	APBD
					UPT.PSDKP WIL 1			547.279.141,00		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	291.126.766,00		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	99.859.906	9077906	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9.077.906,0	Kabupaten Indragiri Hilir	APBD
3	25	01	1.06	'0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	10.032.000	Kabupaten Indragiri Hilir	APBD

3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	2.770.000	Kabupaten Indragiri Hilir	APBD
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	77.980.000,00	Kabupaten Indragiri Hilir	APBD
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	169.714.560	169714560	APBD
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	169.714.560	Kabupaten Indragiri Hilir	APBD
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	21.552.300		APBD
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	15.332.300	Kabupaten Indragiri Hilir	APBD
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	6.220.000	Kabupaten Indragiri Hilir	APBD
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	7 kasus	256.152.375,00	Provinsi Riau	APBD
3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	80	256.152.375		
3	25	5	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku usaha	8.380.000	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	APBD

3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku usaha	220.372.375	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	APBD
3	25	5	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	8 Pelaku usaha	27.400.000	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	APBD
					UP.PSDKP WIL 2			986.914.967	-	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	447.366.967,00		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	156.322.427		
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	45.935.087	Kabupaten Bengkalis	APBD
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	17.664.000	Kabupaten Bengkalis	APBD
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.023.340	Kabupaten Bengkalis	APBD
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	86.700.000	Kabupaten Bengkalis	APBD
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	196.153.540		APBD
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	196.153.540	Kabupaten Bengkalis	APBD

3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Unit	94.891.000		APBD
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	75.381.000	Kabupaten Bengkalis	APBD
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	19.510.000	Kabupaten Bengkalis	APBD
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	7 kasus	539.548.000		APBD
3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		80 Dokumen	539.548.000		APBD
3	25	5	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku usaha	47.790.000	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	APBD
3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	180 Pelaku usaha	491.758.000	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	APBD
					UPT.PSDKP WIL 3			802.368.302		
3	25	01	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	354.848.302		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	6 Jenis	71.701.896		
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.357.774	Kabupaten Rokan Hilir	APBD

3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.728.000	Kabupaten Rokan Hilir	APBD
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.031.122	Kabupaten Rokan Hilir	APBD
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	41.585.000	Kabupaten Rokan Hilir	APBD
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	2 Jenis	29.220.350		APBD
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	29.220.350	Kabupaten Rokan Hilir	APBD
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	197.515.456		APBD
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	197.515.456	Kabupaten Rokan Hilir	APBD
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	56.410.600		APBD
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	21.310.600	Kabupaten Rokan Hilir	APBD
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	30.100.000	Kabupaten Rokan Hilir	APBD
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	5.000.000	Kabupaten Rokan Hilir	APBD

3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	7 kasus	447.520.000		
3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	85	447.520.000		
3	25	5	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	8 Pelaku usaha	30.000.000	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	APBD
3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	75 Pelaku usaha	387.520.000	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	APBD
3	25	5	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku usaha	30.000.000	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	APBD
					UPT.Budidaya Perikanan			5.462.374.501	-	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.310.876.939		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	4 Jenis	158.293.139		
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	55.905.744	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	12.387.395	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	12.000.000	Pekanbaru	APBD

3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	78.000.000	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	1 Jenis	982.308.480		APBD
3	25	01	1.08	'0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	982.308.480	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	170.275.320		APBD
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Jenis	107.265.320	Pekanbaru	APBD
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	63.010.000	Pekanbaru	APBD
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	132.712,51	4.151.497.562		
3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan	102.000.000 Ekor	4.151.497.562		
3	25	04	106	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	2.909.978.682	Pekanbaru	APBD,D AK
3	25	04	106	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.241.518.880	Pekanbaru	APBD,D AK

					UPT.PMHP			459.573.369		
3	25	01	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	271.079.950,00		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	39.862.064		
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.972.206	Kota Dumai	APBD
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.139.858	Kota Dumai	APBD
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	27.750.000	Kota Dumai	APBD
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 jenis	172.044.048		APBD
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	172.044.048	Kota Dumai	APBD
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	59.173.838		APBD
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	21.023.838	Provinsi Riau	APBD
3	25	1	1.10	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	13.150.000	Kota Dumai	APBD
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	25.000.000		APBD

3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Produk hasil olahan perikanan	29.845,28	188.493.419	Provinsi Riau	APBD
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan	5 Dokumen	188.493.419		APBD
3	25	06	102	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10 Kegiatan	188.493.419	Provinsi Riau	APBD
					UPT.PELABUHAN PERIKANAN			29.322.798.016	-	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	782.015.814		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)	6 Jenis	127.873.014		
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	16.167.314	Kota Dumai	APBD
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.200.000	Kota Dumai	APBD
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.505.700	Kota Dumai	APBD
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	91.000.000	Kota Dumai	APBD

3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	432.852.800		APBD
3	25	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	432.852.800	Kota Dumai	APBD
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	221.290.000		APBD
3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	73.440.000	Kota Dumai	APBD
3	25	1	1.10	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	147.850.000	Kota Dumai	APBD
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Kota Dumai	APBD
3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	140.000,00	28.540.782.202		APBD
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola	1 Unit	28.540.782.202	Kota Dumai	APBD
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	3 Unit	28.540.782.202	Kota Dumai	APBD,D AK
								75.063.762.957		

3.3 APBN

Sasaran Kegiatan Prioritas (Bantuan Pemerintah dari DJPB KKP RI di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 adalah Kelompok Masyarakat, Kelompok Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan/atau Lembaga Keagamaan. Indikator Keberhasilan Kegiatan Prioritas (Bantuan Pemerintah dari DJPB KKP RI di Provinsi Riau adalah:

- a. Terlaksana dan tersalurkannya paket bantuan sarana prasarana budidaya
- b. Termanfaatkannya bantuan sarana prasarana budidaya oleh penerima bantuan.

Jumlah Kegiatan Prioritas (Bantuan Pemerintah dari DJPB KKP RI di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 25.

Tabel 25
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya T.A. 2024 dan 2025

No	Uraian Bantuan	Jumlah
1	Alat Penangkapan Ikan	3.600 Unit
2	Kapal Fiber	85 Unit
3	Mesin Kapal Penangkapan Ikan	57 Unit

Tabel 26
Rincian Detail Penerima Bantuan

No	Kabupaten / Kota	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah
1	Kep. Meranti	Nelayan Tenggiri	Desa sokop, Kec. Rangsang Pesisir	Kapal Fiber 1 GT Mesin Inboard KJA	2 Unit
		Kub Gumbang Jaya	Desa Insit Kec. Tebing Tinggi Barat	Alat Penangkapan Ikan Gombang	10 Unit
		Nelayan Kelampai	Desa Tanjung Kedabu Kec. Rangsang Pesisir	Alat Penangkapan Ikan Gill Net 2,5 Inchi	100 Unit
		Kub Tuna Jaya	Desa Tanjung Kedabu Kec. Rangsang Pesisir	Alat Penangkapan Ikan Gill Net 2.75 Inchi	100 Unit
		Kub Bintang Satu	Desa Tanah Merah Kec. Rangsang Pesisir	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,5 Inchi	150 unit

		Nelayan Tenggiri	Desa sokop, Kec. Rangsang Pesisir	Alat Penangkapan Ikan Gill Net 2,5 Inchi	49 pcs
2	Dumai	Kub Bunga Mawar	Kelurahan Pelintung Kec. Medang Kampai	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2 Inchi	100 Unit
		Kub Terubuk Jaya	Kelurahan Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2 Inchi	100 Unit
		Kub Nelayan Sejahtera	Kec. Medang Kampai,	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,5 Inchi	85 Unit
		Kub Nelayan Tuna	Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,5 Inchi	80 Unit
		Kub Senangin	Kelurahan Purnama Kec. Dumai Barat	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,5 Inchi	85 Unit
		Kub Sampan Dayung	Kel. Purnama, Kec. Dumai Barat	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,5 Inchi	85 Unit
		Kub Camar Laut	Kel. Purnama, Kec. Dumai Barat	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,5 Inchi	85 Unit
		Kub Mundam Jaya	Kelurahan Mundam, Kec. Medang Kampai,	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2 Inchi	100 Unit
3	Siak	Nelayan Pantai Harapan	Kampung Selat Guntung, Kec. Sabak Auh	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2 Inchi	100 Unit
		Kub Penguling Jaya	Kampung Kayu Ara Permai Kec. Sungai Apit	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2 Inchi	100 Unit
		Nelayan Binjai Jaya	Kampung Teluk Batil, Kec. Sungai Apit	Kapal Fiber Mesin Katinting 1 GT	10 Unit
4	Rokan Hulu	NELAYAN SUNGAI DUA	Desa Kepenuhan Hulu, Kec. Kepenuhan Hulu	Kapal Fiber Mesin Katinting 1 GT	10 Unit
		NELAYAN BERKAH BERSAMA	Desa Muara Musu, Kec. Rambah Hilir,	Kapal Fiber Mesin Katinting 1 GT	3 Unit
		NELAYAN LUBUK DANAU KAPAS	Desa Kepayang, Kec. Kepenuhan Hulu	Kapal Fiber Mesin Katinting 1 GT	3 Unit
		NELAYAN SUNGAI	Desa Rambah Hilir Timur, Kec. Rambah Hilir	Kapal Fiber Mesin Katinting 1 GT	3 Unit
		NELAYAN TIMUR SEJAHTERA	Desa Kepenuhan Timur, Kec. Kepenuhan	Kapal Fiber Mesin Katinting 1 GT	3 Unit
		KUB UPIH	Desa Rokan Timur, Kec. Rokan IV Koto	Kapal Fiber Mesin Katinting 1 GT	3 Unit

5.	Kampar	Kub Maju Bersama	Desa Bencah Kelubi, Kec. Tapung	Kapal Fiber Mesin Katinting 1 GT	10 Unit
		Kub Tapung Jaya	Desa Koto Aman, Kec. Tapung Hilir,	Kapal Fiber Mesin Katinting 1 GT	10 Unit
6.	Rokan Hilir	Nelayan Harapan Bersama	Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2 Inchi	100 Unit
		Kub Nelayan Pasang Surut	Kepenghuluan Sungai Bakau Kec. Sinaboi	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2.75 Inchi	100 Unit
		Nelayan Samudra Harapan	Kepenghuluan Raja Bejamu, Kec. Sinaboi,	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2 Inchi	175 Unit
		Nelayan Samudra Jaya	Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kec. Sinaboi,	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,5 Inchi	170 Unit
		Nelayan Maju Bersama	Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kec. Pasir Limau Kapas,	Mesin Kapal Penangkapan Ikan	10 Unit
		Nelayan Palika Bersatu	Kec. Pasir Limau Kapas,	Mesin Kapal Penangkapan Ikan	10 Unit
		Nelayan Tuah Sekampung	Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kec. Bangko,	Mesin Kapal Penangkapan Ikan	10 Unit
		Kub Karya Bersatu Nelayan	Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko	Mesin Kapal Penangkapan Ikan	10 Unit
		Nelayan Rezki Sungai Juan	Kelurahan Teluk Merbau, Kec. Kubu,	Mesin Kapal Penangkapan Ikan	10 Unit
		Nelayan Serusa Maju	Kepenghuluan Serusa, Kec. Bangko,	Mesin Kapal Penangkapan Ikan	7 Unit
		Nelayan Maju Bersama	Kel. Pujud Selatan Kec. Pujud	Kapal Fiber Mesin Katinting 1 GT	3 Unit
		Nelayan Maju Bersama	Kel. Pujud Selatan Kec. Pujud	Alat Penangkapan Ikan Gill Net 2 Inchi	184 Unit
7.	Bengkalis	Nelayan Jaya Makmur	Desa Senderak Kecamatan Bengkalis	Kapal Fiber 1 GT Mesin Tempel	5 Unit
		P Kub Kurnia Laut	Desa Simpang Ayam Kec. Bengkalis	Alat Penangkapan Ikan Gill Net 3.5 Inchi	100 Unit
		Nelayan Seruan Fajar	Desa Pangkalan Batang Kec. Bengkalis	Alat Penangkapan Ikan Gill Net 2.5 Inchi	100 Unit
		Nelayan Putri Tanjung	Desa Muntai Kecamatan Bantan	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,5 Inchi	100 Unit

		Kub Maju Bersama	Desa Penebal Kec. Bengkalis	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2 Inchi	150 Unit
		Kn. Harapan Bahari	Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis,	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,5 Inchi	150 Unit
		Kn. Tuah Negeri	Desa Bantan Sari, Kec. Bantan	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,5 Inchi	150 Unit
		Nelayan Harapan Maju	Desa Prapat Tunggal, Kec. Bengkalis,	Alat Penangkapan Ikan Gill Net 3,5 - 3 3/8 Inchi	75 Unit
		Nelayan Bahtera Samudra	Desa Pambang Baru, Kec. Bantan	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,5 Inchi	185 Unit
		Nelayan Arung Samudera	Desa Sebauk Kec. Bengkalis	Alat Penangkapan Ikan Gill Net 3 Inchi	95 Unit
8.	Pelalawan	Nelayan Rempang Rajo	Kelurahan Langgam, Kec. Langgam	Kapal Fiber Mesin Katinting 1 GT	10 Unit
9.	Indragiri Hilir	KUB KEPITING JAYA	Kelurahan Sungai Perak Kec. Tembilahan	Alat Penangkapan Ikan Bottom Gill Net Sei. Perak	100 Unit
		NELAYAN UDANG GALAH	Desa Tanjung Baru, Kec. Tanah Merah	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 4 inchi	86 Unit
		NELAYAN KHAIRUL Hilir	Desa Tanjung Pasir, Kec. Tanah Merah	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 4 inchi	86 Unit
		KUB TENGGIRI	Kel. Tagaraja, Kec. XSu,	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2 inchi	50 Unit
		KUB CAMAR LAUT	Desa Sungai Teritip, Kec. Kateman,	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2 inchi	50 Unit
		KUB BANGAU PUTIH	Desa Sungai Teritip, Kec. Kateman	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2 inchi	50 Unit
		NELAYAN SEJAHTERA	Desa Tanah Merah, Kec. Tanah Merah,	Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2 inchi	100 Unit
10.	Kota Pekanbaru	KUB MAJU BERSAMA	Kelurahan Sri Meranti, Kec. Rumbai	Kapal Fiber Mesin Katinting 1 GT	10 Unit

3.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) target Rp. 1.381.900.000, realisasi Rp. 1.721.968.600, dengan pesentase capaian yang melampaui target yang direncanakan yaitu sebesar 124,61%. Ada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berikut adalah rincian capaian PAD per UPT:

1. UPT Budidaya

Target PAD Rp 766.400.000, realisasi Rp 1.102.758.600, dengan persentase capaian 143,89%. Realisasi PAD UPT Budidaya bersumber dari beberapa komponen pendapatan:

- Produksi Benih Ikan
- Produksi Benur
- Produksi Udang vannamei
- Retribusi Penyewaan Tanah
- Retribusi Pemakaian Ruangan

2. UPT Pelabuhan Perikanan

Target PAD Rp 590.000.000, realisasi Rp 603.760.000, dengan persentase capaian 102,33%. Realisasi PAD UPT Pelabuhan Perikanan bersumber dari:

- Retribusi Pemakaian Ruangan
- Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah (Penjualan Es Balok)

Dari Total realisasi PAD dari kedua UPT menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan pencapaian yang melampaui di atas 100% dari target yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan selama tahun 2024. Laporan ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kami.

Secara umum, kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu diatasi. Capaian-capaian utama yang berhasil diraih antara lain:

1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap terjadi penurunan sebesar 16.223,62 ton atau 11,62% dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan masih dalam batas wajar mengingat dinamika sektor perikanan tangkap
2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya terjadi penurunan relatif kecil sebesar -2.519,46 ton atau -2,02% dibandingkan tahun sebelumnya, Sektor Budidaya Menunjukkan Stabilitas Produksi yang sangat baik
3. Peningkatan Produksi Hasil Olahan terjadi penurunan sebesar 12.927,44 ton atau 45,46% dibandingkan tahun sebelumnya, Penurunan signifikan ini memerlukan perhatian khusus.
4. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kecil, Pembudidaya serta Pengolah Perikanan melalui program bantuan peralatan dan pendampingan.

Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti:

1. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi laut.
2. Pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan di beberapa wilayah.
3. Peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui industri pengolahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, beberapa langkah strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
2. Pengembangan sistem informasi terpadu untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

3. Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat pesisir untuk mendorong ekonomi lokal.
4. Pemberian bantuan kepada Masyarakat pelaku usaha perikanan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan sepanjang tahun 2024. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan di masa mendatang, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Semoga dengan upaya bersama, kita dapat terus memajukan sektor kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya laut Indonesia.